



Menata Indonesia dari Daerah



Laporan Eksekutif Indonesia Governance Index 2014
34 Kabupaten/Kota di Indonesia

“Menata Indonesia dari Daerah”

Laporan Eksekutif Indonesia Governance Index 2014

“Menata Indonesia dari Daerah”

Laporan Eksekutif Indonesia Governance Index 2014

Tim Penulis dan Editor:

Abdul Malik Gismar
Lenny Hidayat
Inda Loekman
Dadan S. Suharmawijaya
Nicolaus Harjanto
Hery Sulistio
Ahmad Fawaiq S.
Arif Nurdiansah
Amalia Fubani Sitanggang
Fitrya Ardziyani Nuril
Riana Ekawati

Layout dan Desain:

Zulfikar Arief

ISBN: 978-602-1616-29-1

Cetakan Pertama, Oktober 2014 oleh Astana Communication

Copyright ©2014

The Partnership for Governance Reform (Kemitraan)

Jl. Wolter Monginsidi No. 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 Indonesia

Materi dari publikasi ini dapat diproduksi ulang untuk tujuan non-komersial (silahkan kirim salinan kepada infoigi@kemitraan.or.id). Segala bentuk produksi ulang dengan cara apapun untuk tujuan komersial harus mendapatkan izin dari The Partnership for Governance Reform (Kemitraan).

Diterbitkan oleh:

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan

(The Partnership for Governance Reform)

Jl. Wolter Monginsidi No. 3, Kebayoran Baru

Jakarta Selatan 12110

Telp. 021-7279-9566, Fax. 021-7250-260/7204-916

Website: www.kemitraan.or.id; www.kemitraan.or.id/igi

Didukung oleh:

Australian Government, Department of Foreign Affairs and Trade

Daftar Isi

Daftar Isi	3
Daftar Grafik dan Diagram	4
Daftar Singkatan	5
Pengantar Direktur Eksekutif	6
Latar Belakang	7
Partisipasi Publik = Modal Sosial Pemerintah	8
Analisa Perbandingan Tata Kelola Daerah	9
Menguak Kinerja Tata Kelola Daerah	9
Tujuh Rekomendasi Menata Indonesia dari Daerah	13
1. Evaluasi Kebijakan Relasi Pusat-Daerah	13
2. Menjaga Keseimbangan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Kesejahteraan	16
3. Evaluasi Daerah Otonomi Baru secara Menyeluruh	18
4. Awasi Kinerja DPR/DPRD	20
5. Optimalisasi sistem <i>E-government</i> (DPRD & Birokrasi) di Daerah	22
6. Sinkronisasi Anggaran Untuk Kesejahteraan	25
7. Perkuat Kerjasama DPRD dan Masyarakat Sipil	27
Lampiran I. Kinerja Rata-Rata Empat Aktor Daerah	31
Lampiran II. Rapor Kinerja 34 Kabupaten/Kota	36
Lampiran III. Gender, Lingkungan Hidup dan Investasi	48
Lampiran V. Daftar Indikator IGI Kabupaten/Kota	54

Daftar Grafik dan Diagram

Daftar Grafik

- Grafik 1. Perbandingan Rata-rata Provinsi dan Kabupaten/Kota
- Grafik 2. Periode Lama Sekolah Laki-Laki dan Perempuan
- Grafik 3. Komposisi APBD di 34 Kabupaten/Kota IGI
- Grafik 4. Peringkat Tata Kelola 34 Kab/Kota IGI 2014
- Grafik 5. Penduduk Miskin 2011, 2012, dan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2012 di 34 Kab/Kota
- Grafik 6. Hasil IGI Tahun 2014 di 10 Daerah Otonomi Baru
- Grafik 7. Rata-rata Skor Per Arena Kabupaten/Kota
- Grafik 8. Capaian Skor Kinerja DPRD IGI 2014
- Grafik 9. APBD Kesehatan Per Kapita Per Penduduk Per Bulan di 33 Provinsi Tahun 2012
- Grafik 10. APBD Pengentasan Kemiskinan Per Kapita Per Penduduk Miskin Per Bulan di 33 Provinsi 2012
- Grafik 11. APBD Kesehatan Per Kapita Per Penduduk Per Bulan di 34 Kab/Kota IGI 2014
- Grafik 12. Anggaran Gaji & Tunjangan DPRD di 34 Kab/Kota IGI 2014 (Dalam Jutaan Rupiah)

Daftar Diagram

- Diagram 1. Transparansi Dokumen Program Kerja LSM&Ormas di 34 Kab/Kota IGI 2014
- Diagram 2. Transparansi Dokumen Kegiatan&Keuangan Asosiasi Bisnis di 34 Kab/Kota IGI 2014
- Diagram 3. Aksesibilitas Prolegda di DPRD di 34 Kab/Kota IGI 2014
- Diagram 4. Aksesibilitas Dana Reses DPRD, di 34 Kab/Kota IGI 2014

Daftar Singkatan

APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
DAK	: Dana Alokasi Khusus
DAU	: Dana Alokasi Umum
DFAT	: <i>Department of Foreign Affairs and Trade</i>
DOB	: Daerah Otonomi Baru
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
EDOB	: Evaluasi Daerah Otonomi Baru
EKPPD	: Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
HDI	: <i>Human Development Index</i>
IGI	: <i>Indonesia Governance Index</i>
IKK	: Indeks Kemahalan Konstruksi
IPM	: Indeks Pembangunan Manusia
Kemendagri	: Kementerian Dalam Negeri
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
KPUD	: Komisi Pemilihan Umum Daerah
KRC	: <i>Knowledge and Resource Center</i>
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
OMS	: Organisasi Masyarakat Sipil
PAD	: Penghasilan Asli Daerah
Parpol	: Partai Politik
Pemilu	: Pemilihan Umum
Pemprov	: Pemerintah Provinsi
Pilkada	: Pemilihan Kepala Daerah
Pilpres	: Pemilihan Presiden
Prolegda	: Program Legislasi Daerah
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
RI	: Republik Indonesia
SDA	: Sumber Daya Alam
SDM	: Sumber Daya Manusia
Sekwan	: Sekretaris Dewan
SKPD	: Satuan Kerja Pemerintah Daerah
SPM	: Standar Pelayanan Minimum
TTU	: Timor Tengah Utara
UU	: Undang-Undang

Pengantar Direktur Eksekutif

Misi Kemitraan adalah menyebarluaskan, memajukan dan melembagakan prinsip-prinsip tata-kepemerintahan yang baik dan bersih antara pemerintah, masyarakat sipil dan dunia usaha dengan memastikan hak asasi manusia, kesetaraan gender, keberpihakan kepada kelompok yang terpinggirkan dan kelestarian lingkungan. Oleh karenanya, sejak berdirinya di awal reformasi Kemitraan secara konsisten mengawal jalannya reformasi dan berkontribusi aktif dalam mendorong perubahan dan diskursus isu-isu pembaruan tata kelola pemerintahan di Indonesia. Sifat nasional, netralitas serta kekuatan jaringan telah membuat Kemitraan dapat berperan secara signifikan dalam isu-isu tata kelola pemerintahan.

Indonesia Governance Index (IGI) merupakan inisiasi Kemitraan untuk berkontribusi secara nyata dalam upaya perbaikan berbagai masalah tata kelola di Indonesia. IGI pertama kali diinisiasi pada tahun 2007 sebagai upaya untuk mengukur dampak-dampak program perbaikan tata kelola di berbagai daerah. Pengukuran pada tingkat provinsi di seluruh provinsi Indonesia telah dihasilkan pada tahun 2008 dan 2012. Namun demikian, portrait menyeluruh terhadap tata kelola daerah belum lengkap bila pengukuran tidak dilakukan pada tingkat kabupaten/kota. Dengan diberlakukannya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah pasca reformasi, kabupaten/kota merupakan ujung tombak Indonesia dalam upaya menyejahterakan rakyat. Melalui kewenangan yang besar dalam mengelola pelayanan publik, dinamika tata kelola tingkat kabupaten/kota ini menjadi sangat urgen untuk diukur.

Sebagai upaya berkontribusi pada penyediaan portrait tata kelola di tingkat kabupaten/kota, mulai awal hingga pertengahan tahun ini Kemitraan melakukan pengukuran di 34 kabupaten/kota. Hasil dari pengukuran di 34 kabupaten/kota tersaji dalam laporan ringkasan eksekutif ini.

Dengan segala kerendahan hati saya ucapkan terimakasih kepada seluruh Bupati/Walikota serta jajarannya atas kerjasamanya dalam pengumpulan data. Terima kasih juga saya sampaikan kepada tim peneliti IGI dan KRC (Knowledge & Resource Center) serta para peneliti kami di setiap wilayah penelitian yang telah bekerja keras hingga IGI dapat dihasilkan.

Dalam kesempatan ini, kami tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada DFAT (Department of Foreign Affairs and Trade Australia) atas dukungan dana terhadap IGI.

Akhir kata, semoga data dan informasi yang disajikan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak sebagai acuan bersama perbaikan tata kelola ke depan.

Jakarta, 14 Oktober 2014

Wicaksono Sarosa, Ph.D
Direktur Eksekutif Kemitraan

Latar Belakang

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah diberlakukan pasca reformasi 1998 membawa konsekuensi perubahan yang fundamental terutama terhadap fungsi dan kewenangan pemerintah daerah. Kebijakan ini diharapkan dapat mendekatkan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan masyarakat. Selain itu, desentralisasi memberikan ruang bagi para pemangku kepentingan di tingkat daerah untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan di daerah masing-masing secara lebih intensif.

Namun demikian, harapan-harapan di atas tidak serta merta terwujud. Tingkat keberhasilan desentralisasi ini pada kenyataannya sangat beragam. Hal ini disebabkan oleh variasi kualitas tata kelola pemerintah maupun kapasitas para pemangku kepentingan di setiap daerah yang berdampak pada kesenjangan tingkat kesejahteraan masyarakat yang cukup lebar di berbagai wilayah di Indonesia.

Indonesia Governance Index (IGI)¹ pertama kali diinisiasi oleh *Partnership for Governance Reform (Kemitraan)* pada tahun 2007 untuk berkontribusi pada upaya perbaikan berbagai permasalahan tata kelola pembangunan di negeri ini. IGI membantu dalam identifikasi maupun pemetaan aspek-aspek pembangunan yang perlu mendapat perhatian. Dengan membangun database tata kelola yang komprehensif, IGI membantu memetakan faktor-faktor kunci untuk mencapai keadilan sosial yang lebih merata dari Barat sampai Timur.

Pengukuran pada tingkat provinsi telah dilakukan Kemitraan pada tahun 2008 dan 2012 untuk seluruh provinsi di Indonesia. Hasil temuan tersebut telah digunakan oleh beberapa pemerintah maupun pemangku kepentingan di tingkat nasional maupun daerah sebagai cermin untuk perbaikan.

Mulai tahun 2013 kembali Kemitraan membangun model pengukuran untuk tingkat kabupaten/kota. Pengukuran pada tingkat kabupaten/kota menjadi penting untuk dilakukan mengingat nafas desentralisasi sejatinya berada pada tingkat kabupaten/kota yang telah diberi kewenangan yang luas untuk menjalankan fungsi-fungsi pelayanan publik.

Pada awal tahun 2014 dilakukan pengukuran di 11 kota dan 23 kabupaten yang mencakup seluruh provinsi (1 kabupaten/kota di setiap provinsi) sebagai wilayah pilot. Kabupaten dan kota dipilih berdasarkan kriteria IPM/HDI (Indeks Pembangunan Manusia/Human Development Index) yang meliputi wilayah yang memiliki IPM tinggi, sedang dan rendah. Selain itu, alat ukur kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang disebut EKPPD (Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) yang

¹ Data yang digunakan IGI Kabupaten/kota adalah anggaran realisasi teraudit tahun 2012 yang dipublikasikan pada bulan Desember 2013. Beberapa daerah yang menggunakan APBD realisasi teraudit tahun 2011 dikarenakan tidak dapat diakses seperti Gorontalo karena disidik oleh Kejaksaan atau mendapatkan *disclaimer* dari BPK seperti Manokwari dan Pulau Pisau. Data APBD realisasi tidak dapat diakses baik di pemerintah daerah dan tidak ditemukan di Departemen Keuangan RI. Khusus untuk Seluma, data birokrasi dan DPRD tidak dapat dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten dan DPRD sehingga Seluma dikeluarkan dari indeks.

diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri juga menjadi pertimbangan pemilihan wilayah pilot sekaligus digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengukur efektivitas kepemimpinan kepala daerah.

Menggunakan 126 indikator yang bersumber dari 30 macam dokumen publik, persepsi dari responden terpilih melalui kriteria ketat serta uji akses dari berbagai dokumen publik, IGI mampu mengukur secara komprehensif empat arena yang berkontribusi pada perwujudan tata kelola daerah yang baik, yaitu pejabat politik, birokrasi, masyarakat sipil dan masyarakat ekonomi. Masing-masing arena ini diukur tingkat kepatuhannya terhadap enam prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu partisipasi, keadilan, transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas.

Partisipasi Publik = Modal Sosial Pemerintah

Produk konkrit dari desentralisasi yang tidak dapat diperdebatkan adalah lahirnya para pemimpin daerah yang telah terbukti dapat membangun daerahnya sendiri, daerah lain dan bahkan menduduki posisi teratas dalam pemerintahan. Desentralisasi dan demokrasi boleh dibanggakan karena telah melahirkan generasi baru pemimpin bangsa.

Namun ternyata IGI menemukan bahwa pemimpin yang baik tidaklah cukup, karena masih dibutuhkan DPRD dan masyarakat yang kuat dan solid. Bisa dikatakan bahwa berhasil tidaknya sebuah daerah bergantung pada cara dan strategi mengelola semua sumber daya yang ada di daerah tersebut oleh keempat aktor tata kelola yang bekerja menjadi satu tim besar. DPRD menelurkan kebijakan dan mengawasi pelaksanaan, Kepala Daerah dan birokrat yang melaksanakan, dan publik yang berpartisipasi dan mengawasi. **Karenanya tata kelola adalah isu bersama, bukan hanya pemerintah.**

Pada kenyataannya, persepsi umum yang ditemukan Tim IGI di daerah adalah tata kelola masih menjadi ranah pemerintahan saja, belum menjadi ranah publik. Hal ini dikarenakan adanya keyakinan para pejabat politik dan birokrat bahwa tata kelola pemerintahan adalah dapur daerah, isu yang dirahasiakan dan tidak boleh dipublikasikan. Temuan ini tentu menjadi bumerang bagi UU Keterbukaan Informasi Publik yang sudah disahkan oleh pemerintah pusat dan diakui oleh pemerintah daerah sendiri.

Kemitraan memiliki posisi yang berbeda dari pemikiran ini. Partisipasi publik dalam tata kelola pemerintahan seharusnya tidak dilihat sebagai musuh atau hal yang tabu. Dengan pengelolaan yang tepat, justru ini menjadi aset bagi pemerintah guna membantu pembangunan daerah.

Di sisi lain, masyarakat juga harus siap dengan membangun relasi yang positif. Ada beberapa daerah yang memang membutuhkan advokasi tetapi di daerah yang sudah lebih stabil, dibutuhkan relasi yang produktif bukan kontra produktif. Jadi bukan cara pandang "*bad news is not good news*" yang dikembangkan, melainkan cara pandang optimistik seperti "*good news is best news*". Dengan lanskap desentralisasi yang baru ini, sudah seharusnya semua pihak berbicara dengan bahasa yang sama dan berlandaskan informasi yang bisa dipercaya. Temuan-temuan IGI ini berusaha menguak sketsa tata kelola daerah yang selama ini mungkin belum pernah dilakukan sebelumnya.

Analisa Perbandingan Tata Kelola Daerah

IGI 2012 menunjukkan kualitas tata kelola tingkat provinsi lebih tinggi daripada tahun 2008. Skor rata-rata 5,1 pada tahun 2008 menjadi 5,7 pada tahun 2012, naik 0,6 poin indeks. Hal ini menunjukkan bahwa **kualitas tata kelola sebenarnya membaik dan dapat dijadikan modal untuk bergerak ke arah yang lebih substantif yaitu pemerataan kesejahteraan.**

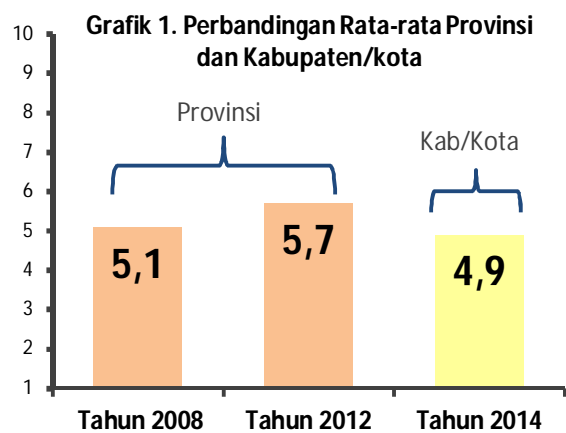
Pada momentum perubahan ini, IGI ingin menaruh kembali mandat dan fungsi masing-masing aktor tata kelola kembali sesuai aturan perundang-undangannya. Namun dikarenakan tidak adanya alat yang dapat melihat secara komprehensif, maka baik pemerintah dan masyarakat tidak memiliki informasi yang memadai untuk melihat fungsi mana yang sudah atau belum terlaksana dengan baik ataupun mau mengawali reformasi dari mana. Terbukti dari fenomena yang terjadi belakangan ini, di mana terjadi ketidakseimbangan relasi antara pemerintah dan masyarakat. Yang terbentuk justru relasi-relasi yang terbentuk bersifat transaksional, elit politik sentris, tertutup dan bahkan kontra-produktif. Dengan adanya peta atau bisa dikatakan anatomi daerah, kita dapat melihat di titik mana dan aktor mana, perubahan seharusnya dimulai.

Menguak Kinerja Tata Kelola Daerah

Hasil IGI di 34 Kabupaten/kota dengan menggunakan 126 indikator menunjukkan **kinerja tata kelola pemerintahan di tingkat kabupaten/kota, sayangnya, tergolong buruk (rata-rata 4,92 dari skala 1 - 10).** Hal ini membuktikan bahwa baik pemerintah² dan masyarakat³ belum bersama-sama secara optimal melakukan refleksi dan berinteraksi guna membangun daerah⁴. Namun di sisi lain, elemen lainnya seperti pemerintah pusat dan DPR RI juga memiliki andil dalam kondisi ini.

Hal yang mengejutkan adalah institusi yang menarik turun kinerja daerah (baik provinsi maupun kabupaten) ternyata pejabat politik, terutama institusi DPRD.

Efeknya sangat besar sehingga mengubah lanskap tata kelola daerah menjadi kurang responsif terhadap kebutuhan publik karena fungsi pengawasan dan rekomendasi kepentingan publik hampir tidak ada. Padahal mandat utama pemerintahan Kabupaten/Kota adalah mendekatkan pelayanan kepada publik dan banyak mata anggaran yang dapat langsung menyentuh masyarakat, misalnya saja, alokasi anggaran



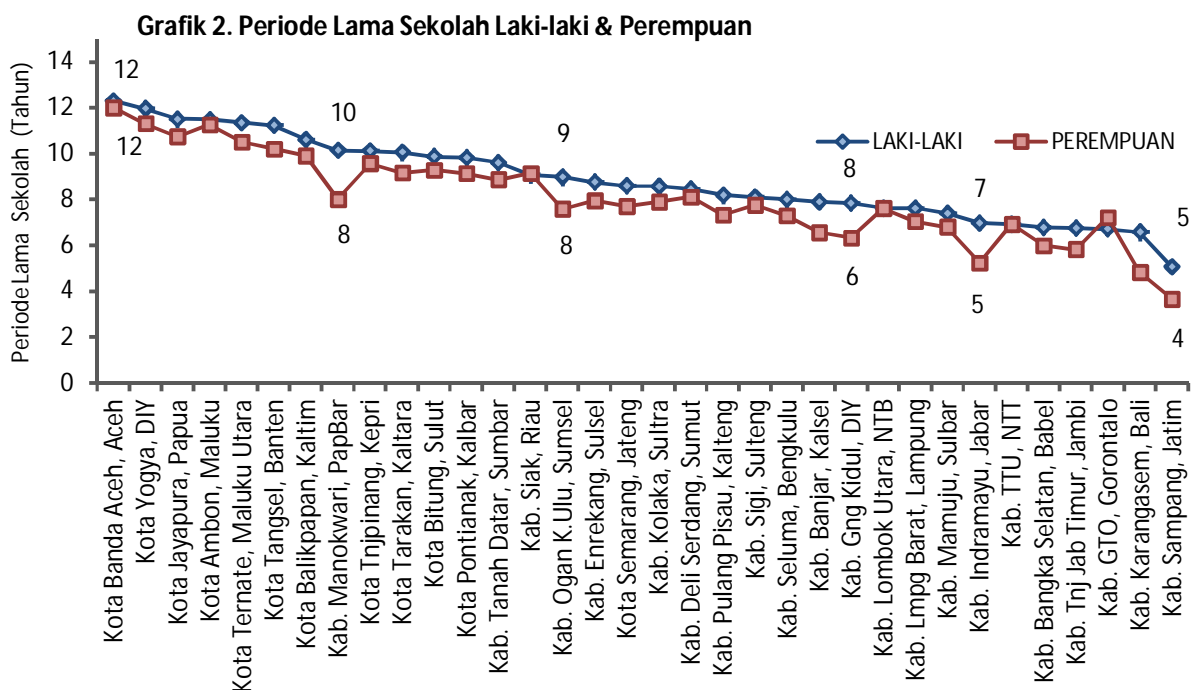
² Pemerintah adalah semua pejabat yang dipilih oleh rakyat termasuk Kepala dan wakil Daerah dan seluruh jajaran DPRD sedangkan birokrat adalah pelaksana kebijakan (SKPD).

³ Masyarakat dibagi menjadi dua, sipil (seluruh bentuk organisasi massa termasuk LSM, universitas, media) dan ekonomi (asosiasi pengusaha).

⁴ Hasil Tim Pemerintah (DPRD, Kepala Daerah dan Birokrasi) berkontribusi 62% terhadap kinerja daerah, sedangkan masyarakat (sipil dan ekonomi) berkontribusi 38%. Tata kelola yang baik dapat dicapai jika dan hanya jika pemerintah dan masyarakat bersinergi.

pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan pengentasan kemiskinan yang lebih besar di level Kabupaten/Kota, diharapkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat. Namun tidak ada sistem *check and balance* yang merupakan faktor kunci dalam sistem demokrasi. Absennya fungsi ini berimplikasi buruknya kinerja daerah yang harus segera ditanggulangi.

Salah satu yang paling fatal adalah semakin besarnya kesenjangan. Contoh kasus paling ekstrim dapat dilihat dari adanya ketimpangan lama sekolah antara laki-laki dan perempuan di tingkat kabupaten/kota. Misalnya Sampang (Jawa Timur), lama sekolah laki-laki 5 tahun, sementara perempuan 4 tahun dan di sisi lain, tercapainya wajib belajar 12 tahun di kota Banda Aceh.



Melihat fakta di atas, sebenarnya sudah menjadi informasi umum di mana orang tua membutuhkan anaknya mendapatkan pendidikan sekolah dasar-menengah, dan rakyat mendapatkan pelayanan kesehatan dengan murah dan mudah, sementara pemerintah menjawabnya dengan membangun fasilitas kantor dan kendaraan mewah, dan birokrat hanya fokus pada bagaimana menghabiskan anggaran, karena jika tidak habis akan dianggap tidak berkinerja bagus atau dipotong anggarannya tahun depan.

Sementara itu, banyak anggota DPRD seperti tidak paham apa tugas dan fungsinya pokoknya, sehingga lebih menyukai pergi ke Jakarta atau studi banding keluar negeri, dan jarang ada di tengah-tengah warganya. Padahal fungsi utama DPRD adalah mendengar dan menyampaikan aspirasi. Namun pertanyaannya, jika bertemu saja susah bagaimana rakyat mau mengadukan persoalan kepada orang yang mewakilinya di pemerintahan.

Menghadapi banyaknya permasalahan daerah, publik merasa tidak puas dan seringkali menyampaikan aspirasinya melalui parlemen jalanan (demo). Jika tuntutananya tidak dipenuhi, demo berujung rusuh dan justru dapat merugikan publik sendiri. Untuk meredam kemarahan publik, pejabat biasanya mudah mengeluarkan pernyataan dan memberikan janji-janji yang kemudian menganggap masalah selesai dengan sendirinya. Lambat laun masyarakat lupa tuntutananya tadi karena sudah lelah dan harus kembali ke rutinitas kesehariannya.

IGI melihat semua kasus ini terjadi akibat dari tidak adanya interaksi positif dan koordinasi antara pemerintah dan rakyat di dalam hal tata kelola pemerintahan. Keempat pelaku utama tata kelola daerah seolah-olah berjalan di dunia yang berbeda dan dengan pemahaman serta tingkat informasi yang jauh berbeda. Misalnya proses pengambilan keputusan di institusi perwakilan rakyat DPR yang cenderung *voting* adalah pandangan sempit terhadap perwujudan sila keempat Pancasila yang berbunyi "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan." Seyogyanya, perwujudan nyata dari sila keempat ini adalah kinerja optimal dan transparan dari setiap wakil rakyat sepanjang menjabat dan bekerja sebagai anggota DPR/D terhadap publik.

Dalam hal ini, IGI mencoba mengingatkan dan menaruh kembali fungsi dan peran masing-masing aktor tata kelola. Dengan bekal data dan bukti konkrit, IGI menyediakan peta anatomi kinerja daerah yang dapat diperbandingkan dan diukur antar daerah. **Terlepas dari begitu banyak analisis daerah yang dapat dihasilkan, IGI ingin memberikan rekomendasi alternatif berdasarkan temuan tren umum dan khusus di 34 kabupaten/kota dengan menguak faktor-faktor kunci perubahan daerah.**

Tujuh Rekomendasi Menata Indonesia dari Daerah

Tujuh Rekomendasi Menata Indonesia dari Daerah

1. Evaluasi Kebijakan Relasi Pusat-Daerah

Temuan IGI:

Dalam era desentralisasi ini, kebijakan pusat sangat berpengaruh terhadap kapasitas daerah. Banyak urusan penting yang dapat mempengaruhi keseluruhan kinerja daerah bergantung pada kebijakan pusat. Beberapa **isu sangat krusial dan harus sesegera mungkin dievaluasi antara lain UU No. 33 tahun 2004 tentang Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (diperkuat oleh UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara), kebijakan rekrutmen PNS, Regulasi Pertambangan**, dan isu penting lainnya karena kapasitas daerah sudah dalam taraf kurang dapat bergerak untuk menambah sumber daya daerah.

Isu Dana Perimbangan⁵ sangat krusial karena **Penghasilan Asli Daerah (PAD)** yang diduga dapat membantu daerah membangun, **rata-rata hanya menyumbang 9-10% total APBD**⁶, sedangkan rata-rata 90% masih bergantung pada Dana Perimbangan.

Formula atau rumus penghitungan DAU saat ini tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat karena faktor-faktor yang menjadi dasar penghitungan hanya berdasarkan kapasitas fisik daerah⁷ tetapi tidak termasuk faktor kinerja daerah sehingga daerah cenderung mengabaikan peningkatan kinerja dan fokus hanya dengan penambahan PNS. Di antara 5 faktor; jumlah penduduk, IPM dan pertumbuhan ekonomi serta Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), tiga faktor berbanding terbalik. Semakin tinggi IPM dan pertumbuhan ekonomi, semakin rendah DAU dan semakin padat jumlah penduduk, semakin terhukum.

Karenanya, satu-satunya cara guna mempertahankan alokasi DAU adalah dengan memperbesar rekrutmen PNS. Hal ini memotivasi daerah untuk selalu menambah jumlah PNS untuk meningkatkan Alokasi Dasar pada rumus DAU⁸. Namun, penambahan PNS seringkali tidak diiringi dengan perubahan beban kerja, sistem appraisal dan evaluasi SDM. Sehingga penambahan PNS cenderung tidak terlalu

⁵ Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

⁶ Kisaran kontribusi PAD terhadap APBD antara 3-18%

⁷ Terdapat 5 faktor dalam rumus penentuan DAU dan DAK yaitu jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks pembangunan Manusia, pertumbuhan ekonomi dan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK). Asumsi dasar rumus penghitungan DAU dan DAK yang telah disepakati oleh seluruh pakar ekonomi Indonesia pada tahun 2004, adalah dengan menambah jumlah PNS, maka akan meningkatkan potensi pasar di daerah. Dengan adanya pasar, maka terciptalah iklim investasi dan pada akhirnya daerah memiliki dorongan untuk meningkatkan investasi daerah dan menerima Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tolak ukur daerah yang ideal adalah Jakarta dimana PAD menyumbang 70% dari total APBD. Namun melihat kesenjangan yang semakin tinggi, sudah waktunya rumus DAU dievaluasi sesuai dengan perkembangan jaman.

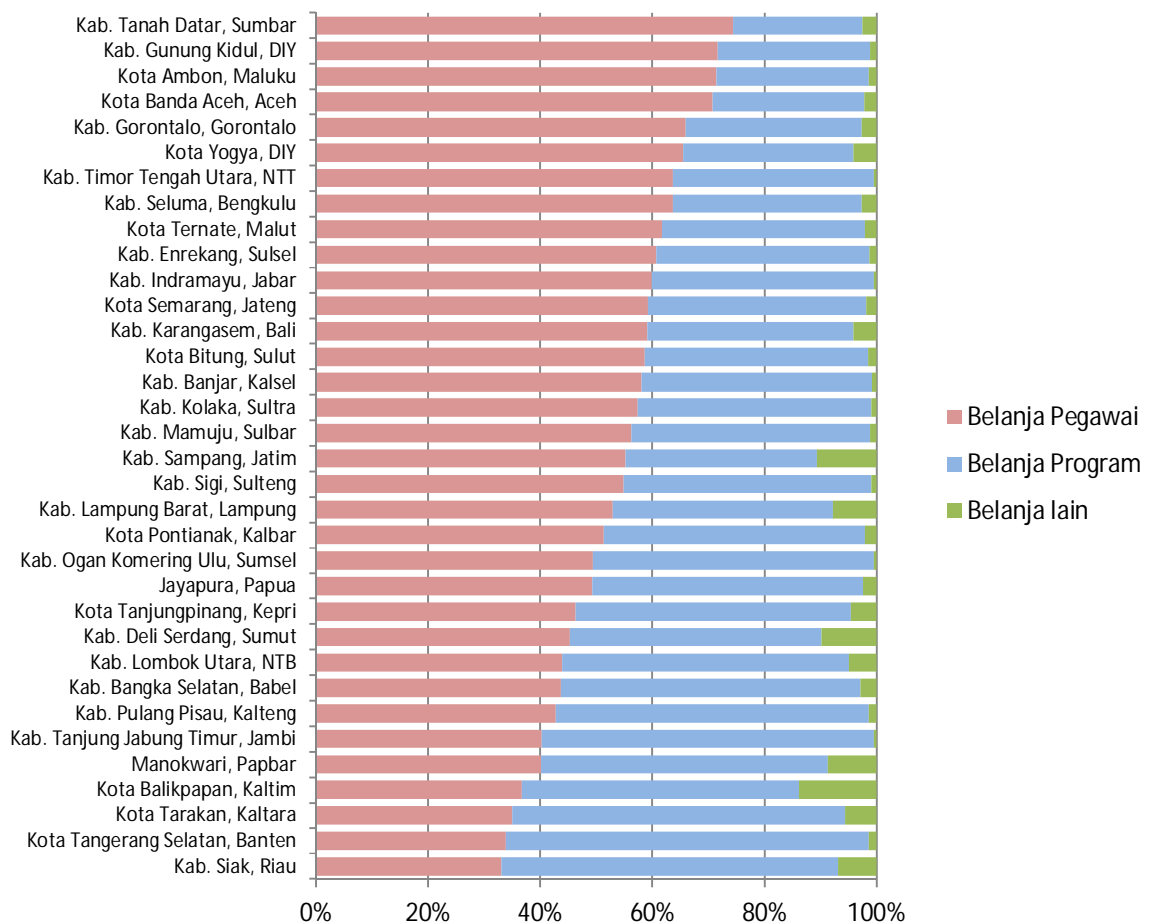
⁸ Dana Alokasi Umum ditentukan berdasarkan Alokasi Dasar yaitu Gaji PNS di daerah dan Celah Fiskal.

mempengaruhi prestasi daerah. Sedangkan untuk menentukan besaran dana pembangunan, tergantung pada celah fiskal⁹.

Tidak heran jika IGI menemukan PNS yang tupoksinya hanya meng-*update* dan menjaga satu *file* data kepegawaian. Di sisi lain, ada PNS yang harus bertanggung jawab semua hal. Kesenjangan beban kerja ini menghamburkan uang rakyat karena tidak disertai dengan penambahan jasa atau barang yang dapat berguna kembali untuk publik.

IGI menemukan rasio belanja operasional yang mencengangkan, dari 34 kabupaten/kota, **70% memiliki belanja aparatur 1-3 kali lipat dari belanja program. Analogi yang bisa digunakan disini adalah untuk menjalankan program seharga Rp. 1.000, dibutuhkan biaya operasional Rp. 1.000- Rp. 3.000.** Sehingga tidak heran alokasi anggaran pelayanan publik dasar menjadi kecil karena tergerus dengan biaya operasional membengkak.

Grafik 3. Komposisi APBD di 34 Kabupaten/Kota IGI 2014



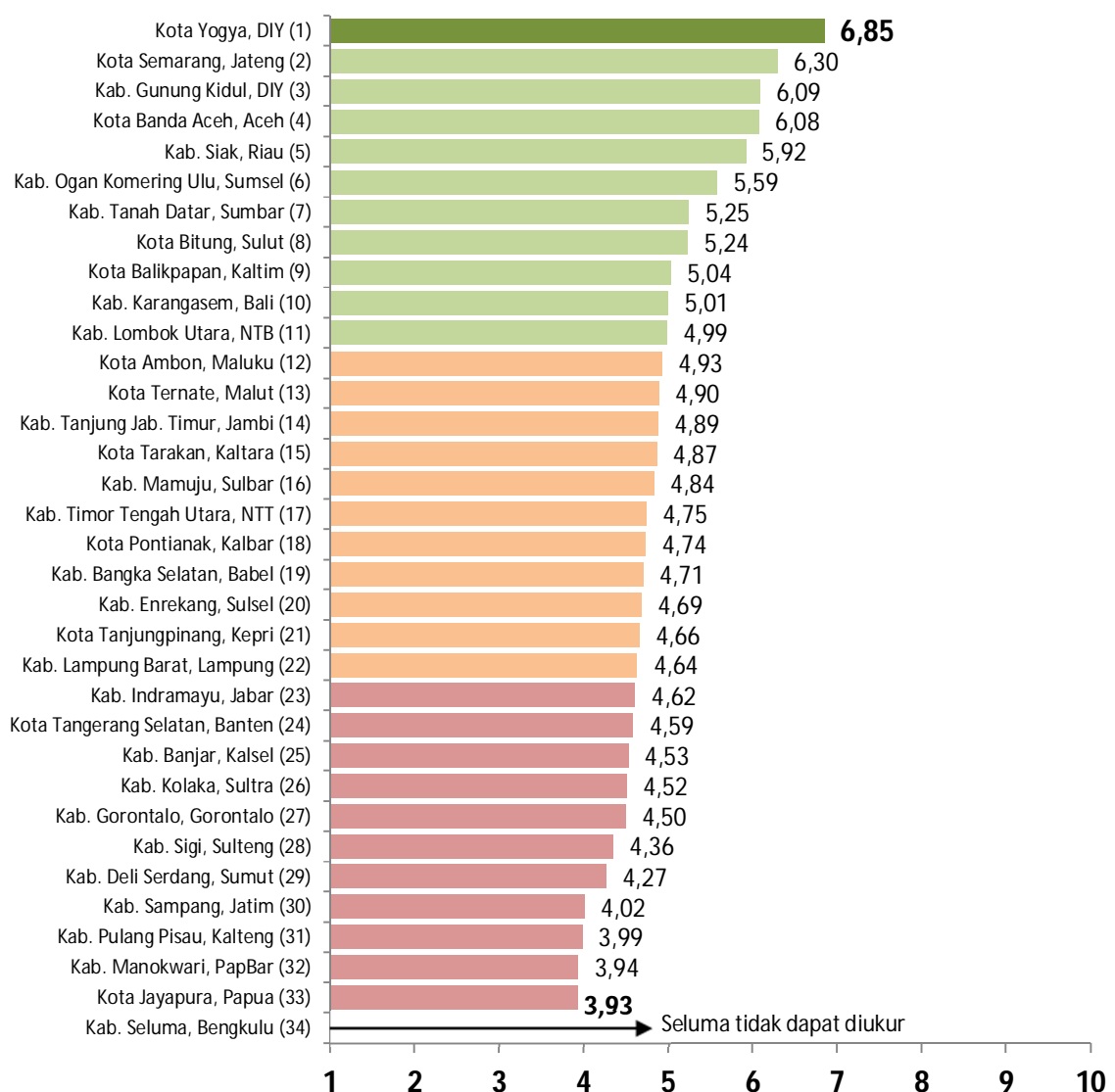
Tren ini terjadi juga pada Provinsi DI Yogyakarta yang berada di posisi teratas dari 33 provinsi¹⁰ dan kota Yogyakarta yang dijadikan tolak ukur 33 kabupaten/kota lainnya. Kota Yogyakarta memiliki belanja

⁹ Celah fiskal adalah selisih antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal. Salah satu indikator kebutuhan fiskal adalah luas wilayah atau jumlah penduduk. Semakin besar, semakin besar pengalokasian dana perimbangan.

aparatur dua kali lipat dari belanja program. Sedangkan nilai yang diperoleh 6,85 di tingkat kabupaten dengan nilai maksimal 10. Jika dengan melipatgandakan operasional terbukti bisa membawa perubahan lebih baik, harusnya DI Yogyakarta memperoleh nilai yang lebih tinggi. Tetapi dengan nilai operasional yang tinggi, tidak serta merta menjamin pencapaian yang tinggi.

Sebagai contoh daerah yang memiliki performa tinggi dengan biaya operasional tidak melebihi 30% adalah Kabupaten Siak. Siak mendapatkan posisi ke-5 dalam indeks tata kelola 34 kabupaten/kota. Hal ini menunjukkan kreatifitas dapat menciptakan efisiensi. Ada sebuah daerah yang dapat mengelola daerahnya sedemikian rupa sehingga operasional tidak membengkak dan alokasi dapat ditujukan untuk pemerataan kesejahteraan secara riil.

Grafik 4. Peringkat Tata Kelola 34 Kab/Kota IGI 2014



¹⁰ Provinsi DI Yogyakarta menduduki posisi teratas dalam rangking IGI 2012 dengan perolehan nilai indeks 6.8 (Skala 0-10)

Selain DAU, insentif terhadap daerah melalui Dana Bagi Hasil maupun PAD menjadi faktor banyaknya regulasi pertambangan serta beberapa konsesi lainnya yang terbit di daerah-daerah dengan kapasitas Sumber Daya Alam (SDA) yang besar. Di sisi lain, masih terdapat jenis pelayanan publik yang masih terpusat khususnya yang terkait dengan infrastruktur yang memiliki karakteristik investasi besar seperti infrastruktur energi khususnya listrik dan bahan bakar.

Rekomendasi:

Inti dari hubungan pusat-daerah terletak pada politik anggaran. Untuk menciptakan kondisi yang kondusif agar daerah semakin tertata melalui **evaluasi UU No. 33 tahun 2004**.

Fokus evaluasi bisa ditujukan ke perubahan formula DAU dan DAK, serta prosentase pembagian Dana Bagi Hasil yang akan sangat mempengaruhi kapasitas fiskal daerah. Perlu menambahkan indikator kinerja tata kelola yang disertai dengan insentif dan sanksi sesuai dengan pencapaian daerah.

Kebijakan diatas akan mempengaruhi rekrutmen dan manajemen SDM di tingkat daerah. Diperlukan analisa beban kerja setiap tahunnya agar ketika PNS baru direkrut, mereka dapat membantu peningkatan kinerja daerah, bukan hanya sekedar menjadi pasar konsumtif atau memenuhi daerah agar ramai menjadi tempat investasi. Peningkatan *human capital* daerah sangat dibutuhkan mengingat sudah 10 tahun berlaku, rumus DAU dan DAK diberlakukan tetapi kesenjangan semakin membesar. Hal ini menandakan rumus ini memerlukan penyesuaian.

Di sisi lain, isu kebijakan pusat yang berhubungan dengan manajemen sumber daya alam dan energi daerah seperti pertambangan, kelautan, energi, menjadi sangat krusial untuk dievaluasi dan diubah sesuai dengan kebutuhan daerah secepat mungkin.

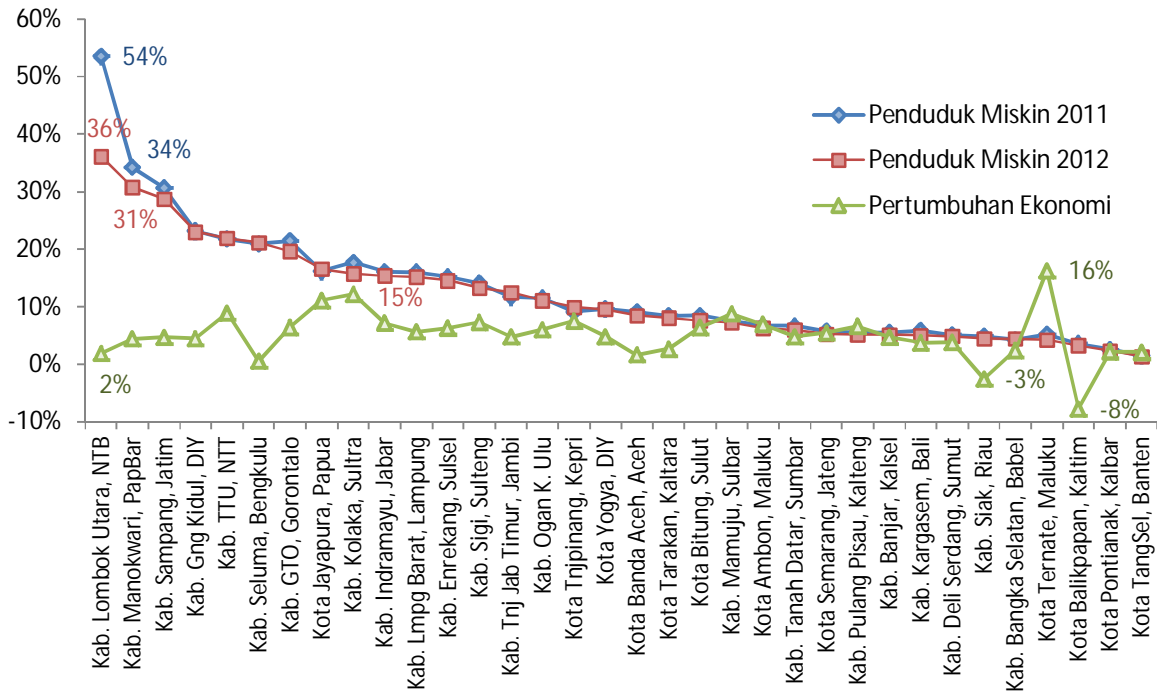
2. Menjaga Keseimbangan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Kesejahteraan

Temuan IGI:

Dari sisi kebijakan, simulasi peringkat IGI provinsi tahun 2008 dan 2012 menunjukkan terdapat 2 kelompok besar provinsi berdasarkan prioritas kebijakan dalam bidang ekonomi, lingkungan dan kemiskinan. **Kelompok yang dapat menjaga keseimbangan kebijakan pertumbuhan ekonomi dan lingkungan, 42% (dari 11 provinsi) dapat menurunkan tingkat kemiskinan rata-rata 1,2%.**

Sedangkan kelompok daerah yang mendahulukan pertumbuhan ekonomi saja (11 provinsi), hanya 27% yang dapat menurunkan tingkat kemiskinan rata-rata 1%. Misal di Jawa Barat dan Indramayu menunjukkan degradasi lingkungan akibat prioritas pada kebijakan pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan ketidakmerataan sosial yang ditunjukkan oleh rasio kesenjangan pendapatan yang tinggi (0.33).

Grafik 5. Penduduk Miskin 2011, 2012 dan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2012 di 34 Kab/Kota



Untuk tingkat kabupaten/kota, dalam tahap pilot ini, baru dapat menunjukkan bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, tidak serta merta menurunkan tingkat kemiskinan. Secara tren, dibuktikan dengan korelasi yang tidak signifikan ($r=0.1$).

Temuan ini menunjukkan bahwa ketika sumber daya alam lokal dieksploitasi hanya demi prestasi pertumbuhan ekonomi jangka pendek, sebenarnya mengorbankan bukan hanya sumber daya alam tetapi dampak yang paling parah sebenarnya adalah keseluruhan daerah terutama sumber daya manusia yaitu *human capital loss*. Contoh konkrit adalah sektor pertanian. Ketika lingkungan dan manajemen SDM dikorbankan, yang terjadi adalah eksploitasi sumber daya alam. Ketika lahan dijual atau digarap untuk kepentingan luar daerah tersebut, generasi muda cenderung tidak mau bertahan di desa. Yang terjadi sekarang adalah Indonesia kekurangan orang yang mau menjadi petani atau bergerak di bidang pertanian. Pada akhirnya sektor ini terbelengkalai. Misalnya daerah-daerah dengan lahan kritis besar, cenderung berada di rangking bawah seperti Bangka Selatan, TTU, dan daerah lainnya.

Rekomendasi:

Karenanya, IGI merekomendasikan untuk mengadaptasi pendekatan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan pemerataan sosial karena pada akhirnya pemerataan sosial sebenarnya menaruh investasi yang jauh lebih besar dalam jangka panjang. Ketika penduduk di sebuah daerah sejahtera, maka kondisi pendukung untuk meningkatkan investasi semakin tinggi.

Bagi daerah yang memang sedang berjuang keluar dari tingkat kemiskinan tinggi, menggenjot sektor perekonomian dan sumber daya alam berkelanjutan mutlak dilakukan agar dapat menyerap tenaga kerja lokal. Misalnya daerah Indramayu, dengan tingkat kemiskinan 15%, angka kematian ibu anak tinggi, Indeks Pembangunan Manusia rendah dan daerah kantong perdagangan manusia, kebijakan ekonomi yang kreatif dan strategis yang menyentuh potensi daerah harus digalakkan.

Sedangkan untuk kabupaten yang lebih cenderung makmur, sebaiknya berinvestasi pada peningkatan sumber daya manusia, infrastruktur dan teknologi. Daerah seperti Siak, Semarang, Yogyakarta seharusnya sudah dapat bergerak ke tingkat kebijakan yang lebih strategis dengan menggunakan modal sosial yang cukup kuat guna meningkatkan kualitas pembangunan daerah.

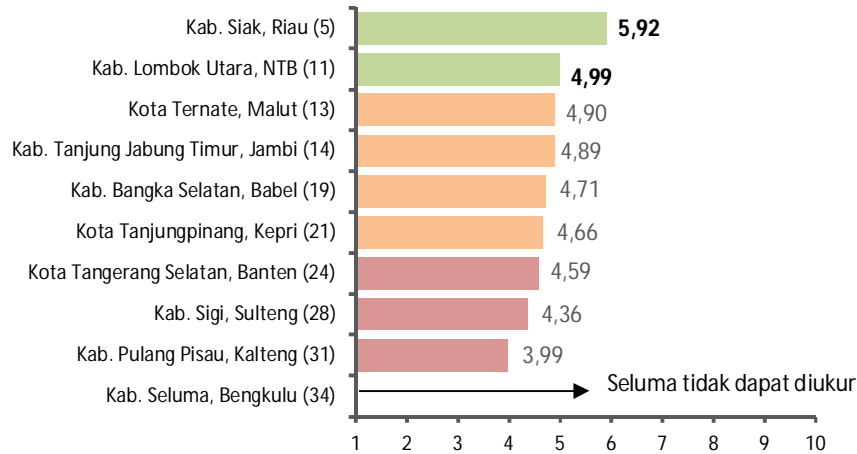
3. Evaluasi Daerah Otonomi Baru secara Menyeluruh

Temuan IGI:

Dari tahun 1999-2013, tercatat pertambahan pemekaran daerah sebanyak 220 daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Hal ini menyebabkan total keseluruhan jumlah provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia adalah 542 Kab/Kota. Sebanyak 102 (50%) merupakan inisiatif DPR-RI dalam memekarkan daerah selebihnya merupakan peningkatan status daerah Administratif menjadi Otonom.

Di antara 34 sampel daerah yang dievaluasi IGI, terdapat 10 Daerah Otonom Baru (DOB). Dari 10 daerah tersebut, hanya 2 daerah berada di atas rata-rata nasional yaitu Siak dan Kabupaten Lombok Utara, sedangkan 8 daerah lainnya berada di bawah rata-rata nasional yaitu **Ternate, Tanjung Jabung Timur, Tanjung Pinang, Pulang Pisau, Seluma, Bangka Selatan, Tangerang Selatan, dan Sigi**. Rata-rata daerah ini telah berdiri lebih dari 10 tahun kecuali Sigi dan Tangerang Selatan yang baru berdiri 6 tahun. Seluma juga menjadi catatan khusus dikarenakan kualitas tata kelola yang buruk sekali dan tertutup. Tim IGI tidak dapat menganalisa dikarenakan minimnya data yang tersedia.

Grafik 6. Hasil IGI Tahun 2014 di 10 Daerah Otonomi Baru



Kemendagri telah mengeluarkan hasil evaluasi DOB¹¹ terakhir pada tahun 2009. Hasilnya menunjukkan 80% DOB tidak bisa memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. Kemendagri mencatat, 7 persen dari 57 DOB selama 2007-2009 berstatus kurang baik atau buruk. Sayangnya, sekalipun menilai buruk, pemerintah dan DPR enggan menggabungkan kembali DOB dengan kabupaten/kota induk. Motivasi di belakang pembentukan daerah bukan untuk pemerataan tetapi bagi-bagi jabatan, kabupaten induk melepas beban dan transaksi antara pemerintah daerah dan DPR.

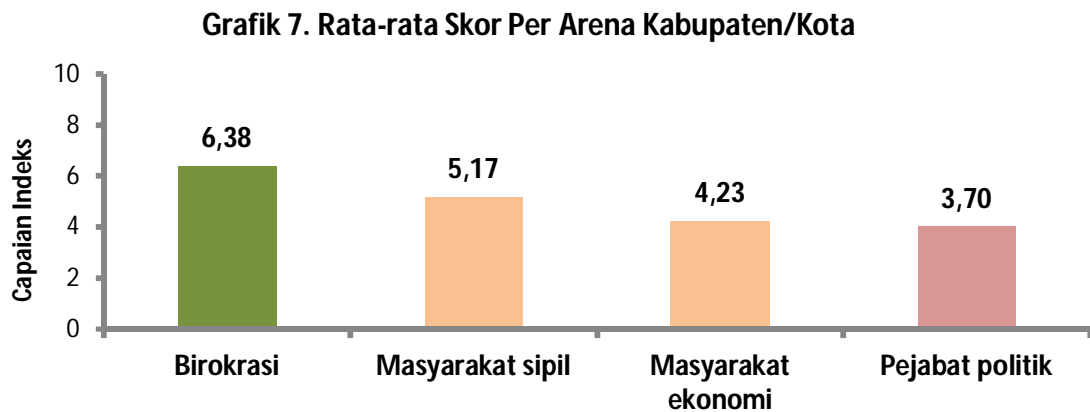
Padahal negara setidaknya menghabiskan dana sekitar Rp 50 triliun untuk pembentukan DOB sejak 1999. Namun, dampak penggelontoran dana tersebut tidak banyak terlihat. Sejumlah DOB malah memunculkan masalah, misalnya sengketa batas wilayah, sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada), kasus korupsi, dan sebagainya. Malah ada yang tidak mampu menyelenggarakan pemerintahan, hanya menjual kekayaan alam kepada pelaku bisnis dan tidak mampu mengelola anggaran.

Sejauh ini kriteria pemerintah daerah telah diatur dengan lebih ketat. Melalui UU Pemerintah Daerah yang baru diharapkan daerah memiliki persiapan yang lebih matang yaitu selama 3 tahun dan dapat dibatalkan jika tidak memenuhi kriteria. Mekanisme *punishment* ini dibutuhkan untuk menjamin efektivitas pelayanan publik di daerah.

¹¹ Ulasan Sinar Harapan - <http://shnews.co/detile-27823-dpr-kangkangi-pemerintah-lewat-pemekaran-daerah.html>)

Rekomendasi:

Berdasarkan temuan di atas, jika kita lihat dari berbagai sisi, bisa disimpulkan bahwa pemekaran tanpa persiapan matang dalam segi SDM dan modal sosial, justru berdampak buruk bagi masyarakat yaitu kesenjangan antar daerah yang semakin melebar dan pelayanan publik yang tidak merata. Karenanya IGI menghimbau bagi pemerintah untuk mengevaluasi dengan berbasis data dan tidak bersifat 5 tahunan tetapi tahunan sehingga dapat diukur perkembangannya per tahun. Belum lagi hasil evaluasi harus bisa diakses oleh seluruh pihak sehingga masyarakat di daerah tersebut pun paham dan tahu perkembangan daerahnya sendiri.



Evaluasi EDOB terakhir hanya melihat dari sisi birokrasi, belum menyeluruh. Karenanya direkomendasikan untuk mengevaluasi EDOB secara menyeluruh dari seluruh aspek fisik, fiskal, tata kelola dan kinerja serta mengulas kinerja pemerintah dan masyarakat. Hasil EDOB sebaiknya dipublikasikan terbuka serta dapat diakses langsung guna membantu proses pengambilan keputusan.

4. Awasi Kinerja DPR/DPRD

Temuan IGI:

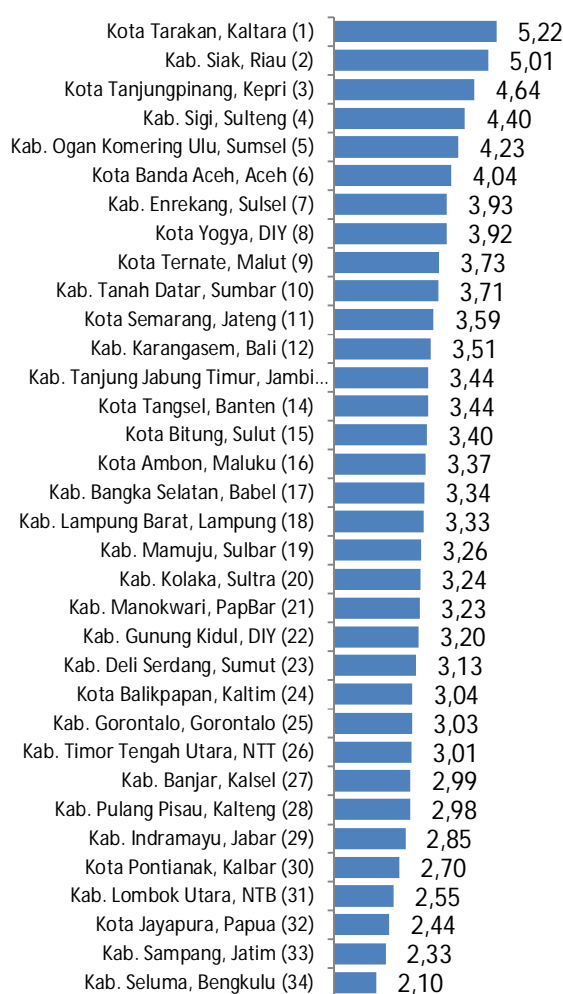
Skor IGI¹² terhadap semua aktor membuktikan bahwa Pejabat Politik yang seharusnya berkontribusi paling besar, justru memiliki kinerja terendah kalah dengan Kepala Daerah, Birokrasi dan Masyarakat.

Fungsi Pejabat Politik yang paling rendah adalah fungsi pembuatan kerangka kebijakan dan pengawasan yang merupakan fungsi utama dari DPR/D. Prestasi DPR/D dalam menelurkan kebijakan yang strategis dan visioner jarang ditemukan, sehingga yang diperlukan sebenarnya reformasi politik. Tanpa reformasi politik, reformasi birokrasi tidak akan berhasil. Kondisi sekarang ini justru terbalik, kompetensi pejabat birokrasi jauh melampaui para pejabat politik.

¹² Skor IGI menunjukkan kinerja masyarakat cenderung lebih baik daripada pemerintah. Meskipun secara umum nilainya masih merah, namun jika dibandingkan antara pelaku, posisi teratas diduduki oleh birokrasi dengan nilai (4.73) diikuti dengan kinerja masyarakat sipil (4.65) dan masyarakat ekonomi (4.18). Sedangkan kinerja pejabat politik menduduki posisi terbawah dengan nilai (3.69).

Kunci perubahan yang selama ini kita yakini berada di tangan Kepala Daerah, tidak serta merta satu-satunya kunci karena sebegus-bagusnya kualitas Kepala Daerah, hanya bisa berjaya maksimal 10 tahun tetapi tidak ada peraturan yang membatasi maksimal berapa kali orang bisa terpilih kembali menjadi anggota DPR/D. Tidaklah heran, anggota DPR/D yang tidak kompeten dan pernah korupsi pun bisa terpilih kembali tanpa disadari oleh para pemilih. Sudah ada beberapa kasus korupsi berjamaah terjadi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di mana seluruh anggota DPRD dicituk karena kasus korupsi seperti di DPRD Provinsi Banten dan DPRD Provinsi Papua Barat serta DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kalimantan Timur) dan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Sulawesi Utara).

Grafik 8. Capaian Skor Kinerja DPRD IGI 2014



Akibatnya, modus kerja pemerintah daerah hanya cenderung mengandalkan perputaran anggaran pemerintah dan menjawab kepentingan jangka pendek (hanya masa periode kekuasaan) partai politik. Tetapi ketika kader sudah menjadi anggota DPRD, partai politik cuci tangan, tanpa bertanggung jawab jika anggota partainya terbukti korupsi.

Institusi yang bertanggung jawab untuk pengkaderan calon politikus adalah partai politik karena sebagian besar pengurus utama partai politik duduk sebagai anggota legislatif. Kondisi ini menyebabkan konflik kepentingan sebagai anggota legislatif dan pengurus utama partai politik terjadi di hampir semua tingkatan lembaga legislatif.

Meskipun demikian tetapi masyarakat tidak pernah meminta pertanggungjawaban dari partai politik dan tidak ada satupun institusi di Negara ini yang bisa “menghukum” partai politik yang memiliki kader buruk.

Partai Politik hanya dihukum oleh tingkat elektabilitas setelah 5 tahun, namun tidak ada hukuman yang signifikan berupa sanksi untuk tidak dapat ikut serta dalam pemilihan umum. Hal ini menunjukkan masih terdapat celah dalam relasi antar institusi terutama di daerah. Dengan mengawasi pejabat politik DPRD, secara otomatis kita mengawasi kinerja partai politik.

Rekomendasi:

Awasi pejabat politik berarti mencegah potensi penyalahgunaan wewenang serta masuknya kader yang tidak kompeten di pemilihan selanjutnya. Hal yang bisa mendorong perubahan ini secara bersamaan adalah dengan mengadakan pemilu serentak, seperti halnya yang kita saksikan pada Pilpres 2014, semua komponen dapat bergerak dan semua fungsi dapat berjalan secara serentak.

Karenanya masyarakat harus memiliki referensi dalam memilih dan mengawasi wakil rakyatnya. Dalam konteks masyarakat demokrasi, kedaulatan di tangan rakyat namun sekali sudah terpilih, maka kekuasaan yang dipegang cenderung akan disalahgunakan ketika tidak ada kendali samasekali.

Dengan menggunakan pengukuran yang independen, objektif dan netral, maka masyarakat dapat memberikan masukan, kritik ataupun rekomendasi yang lebih komprehensif, menyeluruh dan produktif. Sebagai contoh masyarakat dapat mendukung pembuatan sebuah platform *online* yang berisi profil kader partai politik.

Awasi pejabat politik dan pemilu serentaklah yang dapat mereformasi budaya politik dan masyarakat daerah bukan dengan cara pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Pemilihan kepala daerah tidak dapat ditentukan oleh lembaga yang disinyalir paling korup di Negara ini¹³. Bandul wacana pemerintahan daerah dari DPR/D, terlalu menvonis kepala daerah, samasekali tidak menyinggung kinerja DPRD sendiri.

Pilkada serentak juga akan berdampak, secara otomatis, positif terhadap KPU Daerah karena hingga saat ini minim KPUD pun yang menyimpan sejarah pemilu sebelumnya. Tidak heran produk dari KPUD adalah calon legislatif yang buruk karena fasilitasi proses yang buruk. Misalnya hampir semua memuat tentang peraturan tetapi tidak satu pun website yang memuat tentang kinerja KPUD dari dulu hingga saat ini. Untuk sebuah komisi yang mengemban amanah yang begitu penting, sangat disayangkan ketika tuan rumah tidak mendokumentasikan jejak samasekali dari sebuah pesta demokrasi rakyat yang terjadi di tanahnya sendiri.

5. Optimalisasi sistem *E-government* (DPRD & Birokrasi) di Daerah

Temuan IGI:

Bahasa yang digunakan pejabat politik berbeda dengan birokrat dan masyarakat. Dunia empat pelaku ini ibarat 4 dunia dengan dimensi berbeda namun berjalan paralel, jarang sekali bersinggungan dan tidak sinkron. Yang terjadi adalah ketidakcocokan prioritas pembangunan, pelaksanaan dan ekspektasi masyarakat. Harus adanya kesamaan tingkat keterbukaan sehingga dapat menstimulasi interaksi antar pelaku tata kelola. **Terbukti dari temuan IGI, target 5 tahunan tidak pernah terjawab di laporan tahunan kepala daerah.**

¹³ Indeks Korupsi Birokrasi KPK menunjukkan tiga lembaga terkorup adalah kepolisian, DPR dan pengadilan.

Padahal IGI membuktikan melalui penghitungan korelasi antara nilai prinsip transparansi dan efektivitas pejabat politik, semakin transparan pejabat politik, maka kinerja mereka akan semakin naik. Hal dibuktikan oleh angka korelasi yang signifikan ($r=0,3$).

Salah satu faktor utama korelasi yang signifikan adalah kinerja anggota dewan sebenarnya langsung bersinggungan dengan masyarakat dan semakin parlemen membuka akses publik atas dokumen dan laporan mereka, publik dan konstituen dapat membantu mereka. Sehingga ketika mereka tertutup, kinerja mereka langsung turun drastis.

Sama halnya dengan birokrasi dan relasinya dengan masyarakat. **IGI temukan baik birokrasi dan masyarakat (sipil & ekonomi) sangat jarang berbagi tentang kegiatan ataupun program yang sedang dijalankan.**

Dari sisi birokrasi, dari 33 provinsi dan 34 kabupaten/kota, hanya 2 provinsi (DKI Jakarta & Yogyakarta) yang sudah *e-budgeting*. Di tingkat kabupaten/kota, hanya Banda Aceh, Kota Yogyakarta, Semarang, Karangsem dan Balikpapan yang mengunggah APBDnya ke website mereka meskipun belum lengkap. Dengan fasilitasi *e-budgeting*, tata kelola pemerintahan dengan SDM yang kompeten, dapat berjalan lebih efisien dan lebih cepat. Namun di sisi yang lain, masyarakat sipil dan ekonomi di tingkat kabupaten/kota jarang yang berbagi informasi program dan keuangan serta kelembagaan yang bisa diakses oleh publik. Banyak kasus masyarakat sipil juga menutup laporannya dikarenakan terikat peraturan lembaga donor. Untuk masyarakat ekonomi, kecenderungan tertutup dikarenakan mereka tidak merasa harus melapor ke publik dan pemerintah.

Diagram 1. Transparansi Dokumen Program Kerja LSM dan Ormas di 34 Kab/Kota IGI 2014

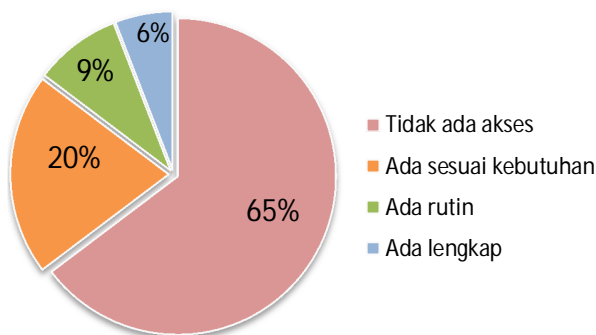
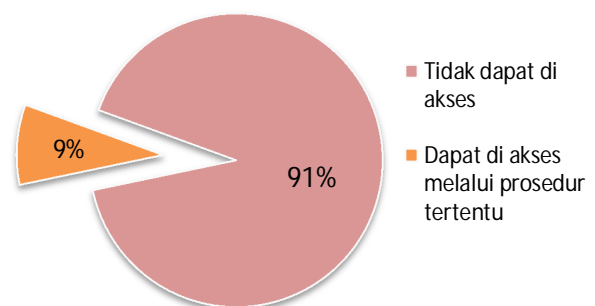


Diagram 2. Transparansi Dokumen Kegiatan & Keuangan Asosiasi Bisnis di 34 Kab/Kota IGI



Selama ini Laporan Kerja Pertanggungjawaban Kepala Daerah hanya berisi prosentase penerapan anggaran. Misal 100% anggaran telah tercapai, bahkan 200% anggaran terealisasi. Apa makna dari 100% atau 200%? Jawaban seharusnya dengan anggaran 100% terealisasi, berapa tingkat kemiskinan yang diturunkan? Berapa persen masalah pendidikan yang bisa diselesaikan? dan sebagainya. Laporan seharusnya menjawab permasalahan dan kebutuhan masyarakat dengan menyeluruh.

Temuan yang sudah menjadi isu publik tetapi terjadi pembiaran adalah **tidak ada satupun institusi DPRD di 34 kabupaten/kota yang dapat memberikan laporan kerja individu anggota DPRD dan secara institusi kepada publik**. Bahkan Daftar Program Legislasi Daerah yang merupakan kewajiban, tidak dapat ditemui di sebagian besar sampel IGI dari tahun 2012 ke belakang. Sehingga dapat dibayangkan institusi semulia DPRD belum pernah dalam sejarahnya dapat melaporkan apa saja yang sudah dilakukan secara tim dan per anggotanya. Sedangkan satu kursi DPR/D mewakili puluhan ribu hingga ratusan ribu rakyat. Legitimasi yang diberikan oleh rakyat telah dilanggar dengan tanpa adanya pelaporan kembali ke publik.

Sekretaris Dewan DPRD cenderung tidak dapat melakukan apa pun dan tertutup dalam hal akses dokumen publik. Di seluruh kabupaten, hampir semua Sekwan DPRD tidak bisa menyerahkan laporan jenis apapun dengan lengkap, baik kunjungan kerja atau rekomendasi. Memang terdapat salinan prolegda dan beberapa risalah rapat namun formalitas dan tidak menunjukkan proses pengambilan keputusan ataupun pertimbangan pengambilan keputusan.

Diagram 3. Aksesibilitas Prolegda di DPRD di 34 Kab/Kota IGI 2014

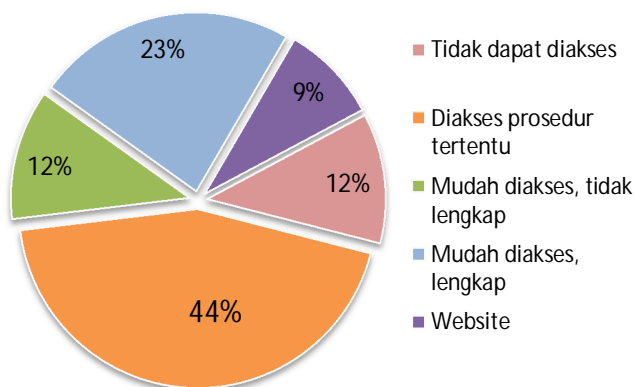
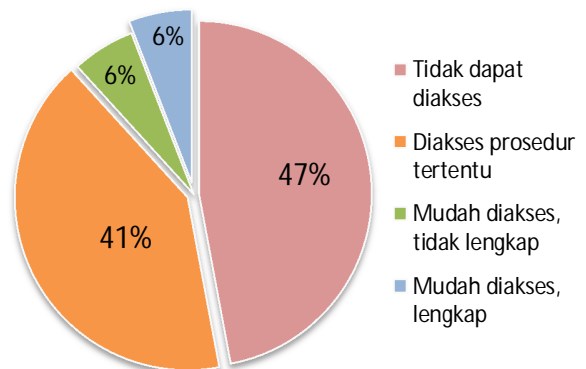


Diagram 4. Aksesibilitas Dana Reses DPRD, di 34 Kab/Kota IGI 2014



Ketika tim IGI mencoba mengakses laporan individu dan kegiatan, sangat amat jarang DPRD memiliki laporan dan rekomendasi tertulis yang strategis baik kepada birokrasi dan masyarakat, bahkan bisa dikatakan, baik eksekutif dan masyarakat tidak paham dan tahu apa saja yang telah mereka kerjakan selain pengesahan undang-undang. Padahal ada fungsi-fungsi lain yang tidak kalah pentingnya.

Rekomendasi:

Mencanangkan laporan *online* baik dari sisi pemerintah dan masyarakat terutama masyarakat sipil. Dengan cara ini, dua arena sama-sama membuka laporan dan diupload secara *online* ke laman formal atau tidak formal untuk masyarakat.

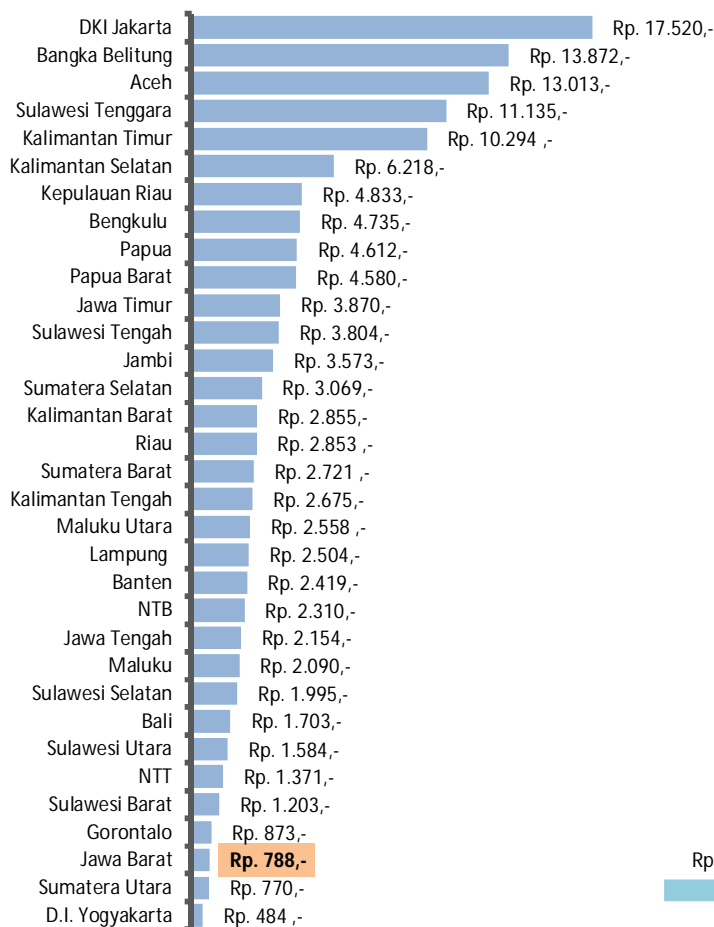
Karenanya dibutuhkan satu sistem yang terkait dengan sistem honor DPR/D guna mewajibkan laporan kepada publik tentang kinerja dan kontribusi individu dan fraksi kepada publik yang dapat dibuat oleh Sekwan, Tim Asisten Ahli atau unit baru di bawah DPRD hanya dengan mengunggahnya ke website DPRD ataupun akun sosial media pribadi anggota. Insentif juga bisa diberikan kepada anggota DPR/D yang aktif dalam mengunggah laporan baik individu maupun atas nama institusi.

6. Sinkronisasi Anggaran Untuk Kesejahteraan

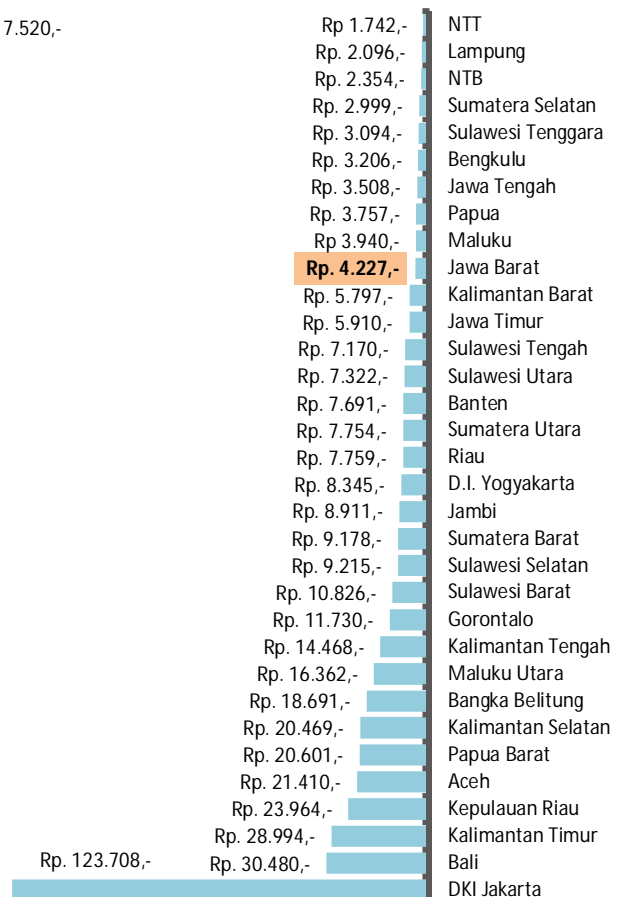
Temuan IGI :

Salah satu mandat bagi pemerintah provinsi adalah mempersempit kesenjangan yang semakin besar antar daerah. Dalam hal keadilan sosial, alokasi anggaran layanan dasar pendidikan, kesehatan, kemiskinan dan akomodasi hak perempuan cenderung masih sangat minim.

Grafik 8. APBD Kesehatan Per Kapita Per Penduduk Per Bulan di 33 Provinsi Tahun 2012



Grafik 9. APBD Pengentasan Kemiskinan Per Kapita Per Penduduk Miskin Per Bulan, 33 Provinsi 2012

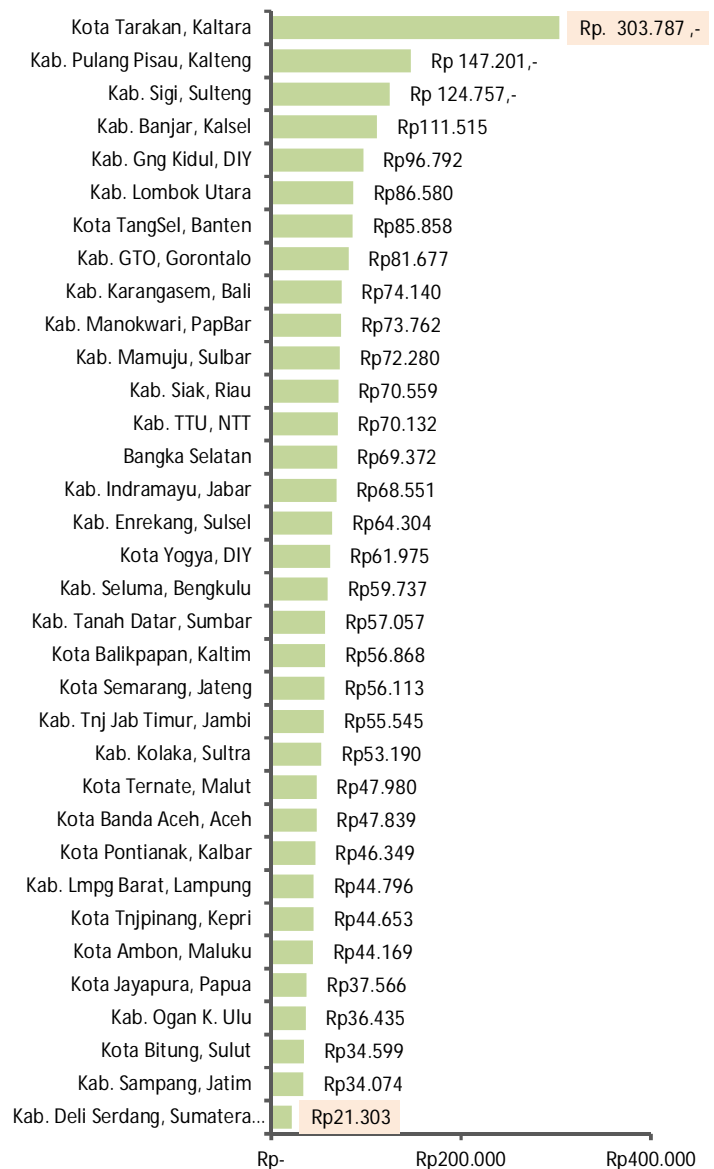


Misalnya kasus Pemerintah Provinsi Jabar yang harus menaruh perhatian khusus kepada Indramayu yang jauh ketinggalan dibandingkan dengan daerah lainnya dengan memberikan **alokasi anggaran Pemprov Jabar untuk kesehatan dan pengentasan kemiskinan yang di tahun 2012, hanya mencapai Rp. 788 per kapita/bulan dan Rp. 4.227 per kapita/bulan. Tentunya bantuan provinsi tidaklah cukup untuk memperkecil kesenjangan semua kabupaten.**

Sama halnya kisaran alokasi pendidikan per anak. **Alokasi anggaran pendidikan tingkat kabupaten/kota rata-rata hampir menyerap 50% Anggaran Pengeluaran dan Belanja Daerah (APBD). Namun rata-rata 85% terserap untuk gaji guru PNS dan staf non PNS.**

Ketika digabungkan dengan alokasi dari pemerintah provinsi tahun sebelumnya, kita mendapatkan **anggaran program pendidikan per anak wajib belajar 12 tahun dengan kisaran 300 ribu – 3.6 juta per tahun, yang berarti 20 ribu – 300 ribu per bulan per anak.** Sulit membayangkan dengan alokasi seperti itu, dapat menyetarakan atau bahkan meningkatkan kualitas kurikulum pendidikan dan kemampuan guru di tingkat kabupaten/kota.

Grafik 10. APBD Kesehatan Per Kapita Per Penduduk Per Bulan di 34 Kab/kota IGI 2014



Hal ini juga berakibat pada kesenjangan lama sekolah perempuan dan laki-laki antar tingkat kabupaten/kota. Contoh kasus di Karangasem Bali, Sampang (Jawa Timur), Indramayu (Jawa Barat) dengan kisaran hanya 4-6 tahun lama sekolah. Hal ini berarti Indonesia bahkan belum mencapai pemerataan wajib belajar 9 tahun. Sedangkan pemerintah pusat sudah mencanangkan wajib belajar 12 tahun. Tentunya hal ini perlu mendapatkan fokus baik secara anggaran ataupun strategi agar target 12 tahun dapat tercapai secara perlahan namun pasti.

Rekomendasi:

Gunakan data dan hitungan per kapita per tahun sebagai rujukan penentuan besaran anggaran dan kebijakan. Daerah yang memiliki anggaran kurang adil seperti yang ditunjukkan oleh IGI, harus meningkatkan alokasi anggaran agar dapat memenuhi standar pelayanan publik yang baik.

Karenanya semua mata utama anggaran SKPD harus dikaitkan dengan analisa substansi melalui e-monitoring & evaluasi antara SKPD. Sampai saat ini, belum ada sistem monitoring & evaluasi daerah yang dapat diakses bahkan oleh kepala daerah sendiri, padahal kualitas tata kelola dapat diperbandingkan dengan mengambil indikator-indikator kunci (seperti sistem IGI). Dengan cara ini, baik pemerintah ataupun rakyat mendapatkan informasi yang sama dan cepat sehingga dapat digunakan sebagai pertimbangan pengambilan keputusan dan partisipasi publik.

Hasil evaluasi yang baik adalah hasil yang dapat menstimulasi bukan hanya perbaikan internal pemerintah tetapi juga membuka kesempatan bagi partisipasi publik guna memikirkan kemajuan daerah masing-masing. Sehingga membangun sistem pengawasan dan evaluasi bukan hanya bergantung pada kecanggihan alat, teknologi ataupun indikator yang kompleks tetapi lebih ke keramahan informasi di mana masyarakat dari golongan mana pun dapat membaca dan memahami kondisi daerah mereka.

7. Perkuat Kerjasama DPRD dan Masyarakat Sipil

Temuan IGI:

Absennya fungsi pengawasan mengakibatkan kerugian yang amat besar bagi daerah. Namun selama ini pendekatan masyarakat sipil hanya menyentuh hilir, pejabat baru diawasi ketika sudah terpilih.

IGI melihat strategi ini masih bersifat jangka pendek. Dari sisi anggaran sampel 34 kabupaten/kota yang diteliti IGI, didapatkan kisaran anggaran antara 10-61 milyar untuk mendanai operasional 25-50 anggota DPRD per tahun. Jika dihitung **rata-rata per anggota membutuhkan 754 juta rupiah per tahun berupa gaji, fasilitas, tunjangan dan operasional institusi**. Pertanyaan berikutnya adalah mengapa begitu banyak demonstrasi dan protes yang diluncurkan kepada pemerintah tetapi belum bisa mengubah keadaan. Hal ini disebabkan oleh gerakan masyarakat dan media masih cenderung sporadis dan hanyut dalam tren tanpa sinergi yang kuat.

Hal ini menyebabkan masyarakat cenderung "lupa" isu dan "lupa" fokus. Gugatan protes memang diperlukan tetapi hanya melalui media tanpa menggugat perubahan struktural dan proses. Masyarakat terutama di tingkat kabupaten/kota sangat kurang menjalankan fungsi pengawasan dikarenakan tidak adanya akses informasi yang dapat mereka pahami tentang kinerja pemerintah.

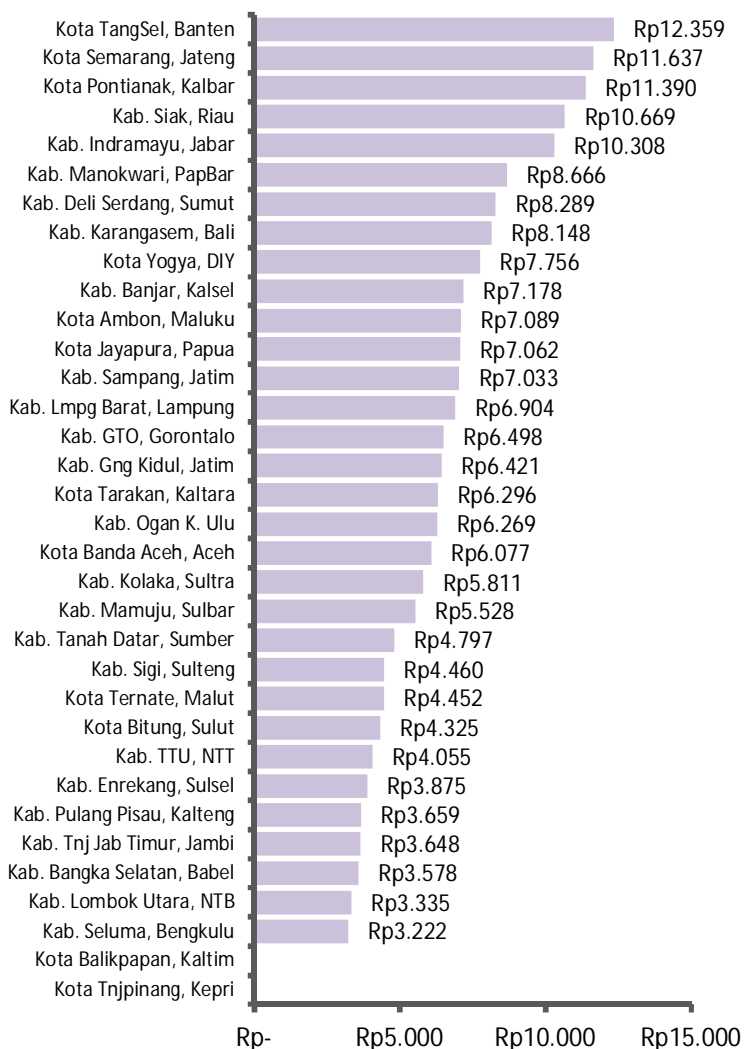
Contoh yang paling konkrit adalah terpilihnya kembali anggota DPR dan DPRD periode 2009-2014 yang korup menjadi anggota DPR/D kembali untuk 2014-2019. Hal ini menunjukkan absennya pengukuran

kinerja anggota parlemen. Sehingga **masuk ke institusi DPR/D ibarat masuk ke segitiga Bermuda, ditelan hilang tanpa jejak.**

Saat ini terekam lebih dari 70 mantan anggota DPR terbukti korupsi, 4 daerah dengan seluruh anggota DPRDnya diduga terlibat kasus korupsi, yaitu DPRD Provinsi Papua Barat dan Sumatera Barat dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Kutai Kartanegara periode 2009-2014.

Parahnya sebanyak 48 tersangkut kasus korupsi terpilih kembali (26 anggota DPRD Kabupaten/Kotamadya, 17 anggota DPRD Provinsi, dan lima orang akan dilantik sebagai anggota DPR RI)¹⁴. Berdasarkan status hukum, sebanyak 32 orang berstatus tersangka korupsi, 15 orang terdakwa dan satu orang merupakan terpidana.

Grafik 11. Anggaran Gaji & Tunjangan DPRD, 34 Kab/Kota IGI 2014 (Dalam Jutaan Rupiah)



Rekomendasi:

Sementara Kepala Daerah dan SKPD sedang bekerja, DPRD seharusnya menjalankan fungsi pengawasan yang ketat baik dengan penelitian baik kuantitatif ataupun kualitatif longitudinal ataupun survei kepuasan masyarakat untuk mengawasi dampak pembangunan. Bukan hanya dengan studi banding ke daerah lain yang tidak ada relevansinya dengan konteks daerah.

Hal ini dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan masyarakat sipil dan ekonomi dengan cara mengkoordinasi dana hibah dari masyarakat ekonomi guna membantu pengawasan. Contoh konkrit dapat dilihat pada beberapa bupati seperti **Bupati Kabupaten Siak di mana Kepala Daerah menjalin kerjasama dengan pihak swasta dan LSM dalam melaksanakan program pembangunan.** Namun **belum terdengar DPRD menjalin kerjasama dengan pihak universitas ataupun**

¹⁴ Sumber: Indonesia Corruption Watch (ICW), "ICW: 48 Calon Anggota Legislatif Terpilih Terlibat Korupsi", 15 September 2014. <http://nasional.kompas.com/read/2014/09/15/16541981/ICW.48.Calon.Anggota.Legislatif.Terpilih.Terlibat.Korupsi>

organisasi masyarakat guna mengawasi jalannya pembangunan daerah.

DPRD memiliki anggaran yang memadai untuk melakukan penelitian komprehensif ataupun survei guna menjadi bahan rekomendasi kebijakan kepada eksekutif. Dengan menggunakan anggaran, DPRD dapat bekerja sama dengan universitas, media atau LSM guna menjalankan pengawasan pembangunan yang lebih efektif dan bermanfaat.

LAMPIRAN I

KINERJA RATA-RATA EMPAT AKTOR DAERAH

Lampiran I. Kinerja Rata-Rata Empat Aktor Daerah

Rapor Kinerja Pejabat Politik (Kepala Daerah & DPRD)

Arena dan Fungsi	Indeks Rata-rata	Partisipasi	Transparansi	Keadilan	Akuntabilitas	Efisiensi	Efektivitas
Pejabat Politik	3.70	3.80	3.71	2.58	3.38	6.09	3.19
1. Kerangka Kebijakan	3.83	3.55	4.92	2.57	4.32	5.70	2.46
2. Penganggaran	4.44	4.94	4.22	2.86	5.52	6.91	3.79
3. Pengawasan	2.48	2.16	2.96	2.49	1.82	4.66	1.59
4. Kepemimpinan	4.08	4.76	3.29	2.53	3.21	6.94	6.01

Rata-rata nilai kinerja Pejabat Politik di 34 kabupaten/kota merupakan yang terendah dibandingkan 3 arena lainnya. Rendahnya capaian di arena ini disumbang oleh nilai rata-rata di setiap fungsi yang hanya berkisaran 2,48-4,44 dari skala 1-10. Sementara itu, nilai rata-rata arena ini disumbangkan oleh 6 prinsip tata kelola dengan capaian terendah pada akuntabilitas fungsi pengawasan DPRD (1,82) dan tertinggi pada efisiensi fungsi kepemimpinan Kepala Daerah (6,94).

Nilai prinsip keadilan secara keseluruhan yang mencakup 4 fungsi kewenangan Pejabat Politik memperoleh nilai terendah dibandingkan ke-5 prinsip yang lain dengan nilai pada kisaran 2,49-2,86 dari skala 1-10. Sementara itu, capaian nilai prinsip tertinggi adalah efisiensi pada fungsi kepemimpinan Kepala Daerah (6,94). Namun demikian, karena lebih banyak capaian nilai di bawah angka 5 maka capaian nilai di atas 6 pada prinsip efisiensi tidak dapat mengangkat nilai arena secara keseluruhan.

Rapor Kinerja Birokrasi

Arena dan Fungsi	Indeks Rata-rata	Partisipasi	Transparansi	Keadilan	Akuntabilitas	Efisiensi	Efektivitas
Birokrasi	6.38	2.91	4.29	5.22	5.06	4.96	5.76
1. Pelayanan Publik	5.13	3.53	4.30	6.51	5.23	4.62	5.15
2. Pengumpul Pendapatan Daerah	5.40	2.53	4.04	4.32	5.81	8.73	8.68
3. Pengaturan Ekonomi	3.97	1.82	5.01	1.45	4.90	5.52	5.57
4. Penegakan Peraturan Daerah	3.41	2.64	3.67	3.67	4.09	3.08	2.46

Nilai rata-rata Arena Birokrasi di 34 kabupaten/kota merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan 3 arena lainnya. Nilai tinggi tersebut disumbangkan oleh kinerja fungsi birokrasi sebagai pengumpul pendapatan daerah dan pelayanan publik di daerah yang memperoleh nilai di atas 8 untuk prinsip efisiensi (8,73) dan efektivitas (8,68). Sayangnya, rata-rata nilai fungsi pelayanan publik hanya mencapai 5,13, sementara nilai fungsi pengumpul pendapatan daerah mencapai 5,40. Fungsi-fungsi yang memperoleh nilai rendah di arena ini adalah fungsi penegak peraturan daerah (3,41) dan pengatur kegiatan ekonomi (3,97).

Memperhatikan nilai prinsip, nilai terendah terdapat pada Prinsip Partisipasi dengan nilai 2,91. Nilai prinsip yang rendah ini dikontribusikan oleh rendahnya kualitas pengaduan masyarakat yang ada di seluruh fungsi di Arena Birokrasi. Sementara itu, prinsip dengan nilai tertinggi terdapat pada Prinsip Efektivitas (5,76). Beberapa indikator kinerja pada tingkat *outcome* merupakan penyumbang utama tingginya nilai efektivitas di Arena Birokrasi. Beberapa indikator *outcome* yang digunakan untuk mengukur antara lain: pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, indeks pemberdayaan gender serta realisasi PAD di setiap kabupaten/kota.

Rapor Kinerja Masyarakat Sipil

Arena dan Fungsi	Indeks Rata-rata	Partisipasi	Transparansi	Keadilan	Akuntabilitas	Efisiensi	Efektivitas
Masyarakat Sipil	5.17	4.53	4.63	6.37	4.87	4.94	6.03
1. Pemberdayaan Masyarakat	5.06	4.76	3.97	7.04	4.54	4.94	5.47
2. Monitoring dan Advokasi	5.30	4.20	5.50	5.61	5.34	4.94	6.81

Rata-rata nilai Masyarakat sipil di 34 kabupaten/kota adalah 5,17 yang lebih rendah bila dibandingkan dengan IGI tingkat provinsi (6,33). Nilai ini disumbangkan oleh nilai fungsi pemberdayaan masyarakat (5,06) dan fungsi monitoring dan advokasi (5,30). Dilihat per prinsip, nilai prinsip yang tinggi disumbangkan oleh Prinsip Keadilan (6,37) dan Prinsip Efektivitas (6,03). Sementara itu, transparansi (4,63) dan akuntabilitas (4,87) di kedua fungsi tersebut merupakan prinsip dengan nilai rendah dengan capaian di bawah angka 5.

Berbeda dengan sebagian besar organisasi masyarakat sipil (OMS) di tingkat provinsi yang cenderung memiliki jaringan sampai tingkat nasional, OMS kabupaten/kota memiliki jaringan terbatas dan terafiliasi pada tokoh-tokoh penting di kabupaten/kota tersebut. Keterbatasan juga menyebabkan sistem pengelolaan organisasi di OMS kabupaten/kota kurang transparan dan akuntabel dibandingkan dengan OMS di tingkat provinsi. Selain itu, kondisi OMS yang sebagian besar terafiliasi dengan beberapa tokoh kunci di daerah membuat OMS di kabupaten/kota cenderung kurang independen.

Meskipun demikian, kedekatan OMS dengan masyarakat di sekitar kabupaten/kota dapat menjelaskan tingginya nilai keadilan dan efektivitas masyarakat sipil di tingkat kabupaten/kota. Temuan tim IGI di beberapa kabupaten menunjukkan bahwa sebagian besar OMS di kabupaten/kota mampu merespon kebutuhan masyarakat di kabupaten/kota. Hal tersebut ditunjukkan antara lain oleh indikator IGI terkait kategori OMS dan fokus isu yang diperjuangkan baik dalam pemberdayaan masyarakat maupun monitoring dan advokasi. Sementara itu, sebagian besar responden terpilih (*Well Informed Person/WIP*) IGI berpendapat bahwa OMS cukup efektif dalam menjalankan fungsi pemberdayaan dan advokasi di tingkat kabupaten/kota namun area perbaikan yang paling utama adalah penggunaan data ilmiah dan advokasi berbasis data serta konsolidasi jejaring baik di tingkat kabupaten, provinsi dan nasional. IGI membuktikan semakin kuat masyarakat sipil, maka semakin tinggi kinerja daerah.

Rapor Kinerja Masyarakat Ekonomi

Arena dan Fungsi	Indeks Rata-rata	Partisipasi	Transparansi	Keadilan	Akuntabilitas	Efisiensi	Efektivitas
Masyarakat Ekonomi	4.23	4.01	1.12	5.86	5.19	4.60	4.20
1. Perlindungan Kepentingan Bisnis	3.31	1.00	1.16	5.10	5.86	4.04	1.67
2. Pemberdayaan Ekonomi	4.54	4.87	1.11	6.08	4.91	4.84	5.12

Gambaran yang tidak jauh berbeda juga terdapat pada Arena Masyarakat Ekonomi. Nilai rata-rata arena ini lebih rendah dibandingkan dengan hasil IGI tingkat provinsi (5,72). Rendahnya nilai tersebut disumbangkan oleh ketidakefektifan arena ini dalam menjalankan perannya dalam memberi perlindungan terhadap kepentingan bisnis (3,31) dan pemberdayaan ekonomi lokal (4,54).

Dilihat dari nilai per prinsip, nilai terendah terdapat pada Prinsip Partisipasi (1,12) dan Prinsip Partisipasi (4,01). Sementara itu, Prinsip Keadilan (5,86) dan Prinsip Akuntabilitas (5,19) memperoleh nilai lebih tinggi.

Arena ini diwakili oleh asosiasi bisnis di kabupaten/kota yang masih sangat eksklusif. Hal ini menyebabkan transparansi terhadap pengelolaan organisasi masyarakat ekonomi masih sangat rendah. Eksklusivitas beberapa aktor ekonomi di kabupaten/kota juga yang menjelaskan mengapa partisipasi aktor ekonomi di arena ini rendah. Sementara itu, kepatuhan aktor ekonomi untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak dan retribusi serta tanggung jawab terhadap pengelolaan lingkungan merupakan faktor yang menjelaskan tingginya nilai akuntabilitas di Arena Masyarakat Ekonomi.

LAMPIRAN II

Rapor Kinerja 34 Kabupaten/Kota

Lampiran II. Rapor Kinerja 34 Kabupaten/Kota

1. Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh

Arena	Indeks Arena	Partisipasi	Transparansi	Keadilan	Akuntabilitas	Efisiensi	Efektivitas
Pejabat Politik	5,04	5,82	7,18	3,66	3,25	7,05	2,52
Birokrasi	8,26	5,80	8,43	6,24	6,69	5,41	7,04
Masyarakat Sipil	6,61	3,73	9,69	6,70	9,74	4,13	5,04
Masyarakat Ekonomi	3,32	3,27	1,00	4,97	3,29	4,31	2,96

2. Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara

Arena	Indeks Arena	Partisipasi	Transparansi	Keadilan	Akuntabilitas	Efisiensi	Efektivitas
Pejabat Politik	3,45	5,36	2,58	1,31	2,74	6,79	1,77
Birokrasi	5,47	5,48	1,65	4,92	3,65	4,11	6,64
Masyarakat Sipil	4,74	4,35	6,08	1,00	6,62	5,08	5,77
Masyarakat Ekonomi	2,95	3,51	1,00	2,96	4,76	1,78	3,25

3. Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat

Arena	Indeks Arena	Partisipasi	Transparansi	Keadilan	Akuntabilitas	Efisiensi	Efektivitas
Pejabat Politik	3,45	5,36	2,58	1,31	2,74	6,79	2,11
Birokrasi	5,47	5,48	1,65	4,92	3,65	4,11	6,50
Masyarakat Sipil	4,74	4,35	6,08	1,00	6,62	5,08	5,89
Masyarakat Ekonomi	2,95	3,51	1,00	2,96	4,76	1,78	4,84

4. Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan

Arena	Indeks Arena	Partisipasi	Transparansi	Keadilan	Akuntabilitas	Efisiensi	Efektivitas
Pejabat Politik	4,72	5,20	2,63	4,53	5,82	6,17	4,65
Birokrasi	6,43	2,69	2,80	5,10	5,06	5,52	5,75
Masyarakat Sipil	6,01	5,34	4,34	7,43	7,32	5,99	5,97
Masyarakat Ekonomi	4,84	4,23	2,80	5,78	6,03	5,90	4,35

5. Kabupaten Siak, Provinsi Riau

Arena	Indeks Arena	Partisipasi	Transparansi	Keadilan	Akuntabilitas	Efisiensi	Efektivitas
Pejabat Politik	5,29	5,27	6,63	3,31	5,17	8,36	3,43
Birokrasi	7,27	4,87	6,63	5,57	5,89	6,19	6,02
Masyarakat Sipil	5,72	5,17	5,57	7,98	5,26	4,71	5,30
Masyarakat Ekonomi	4,66	4,45	1,50	5,91	5,90	4,95	5,04

6. Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi

Arena	Indeks Arena	Partisipasi	Transparansi	Keadilan	Akuntabilitas	Efisiensi	Efektivitas
Pejabat Politik	4,10	4,40	2,93	3,47	4,60	6,20	3,22
Birokrasi	6,08	1,18	2,11	5,51	6,52	5,00	5,20
Masyarakat Sipil	4,52	4,63	2,38	7,29	2,73	4,63	5,96
Masyarakat Ekonomi	4,53	3,62	2,80	6,94	5,07	2,33	4,63

7. Kabupaten Lampung Barat, Lampung

Arena	Indeks Arena	Partisipasi	Transparansi	Keadilan	Akuntabilitas	Efisiensi	Efektivitas
Pejabat Politik	3,69	4,29	4,24	1,85	3,57	5,16	3,75
Birokrasi	5,66	1,00	2,74	5,28	5,05	4,01	5,08
Masyarakat Sipil	4,60	4,57	2,38	7,12	2,45	5,08	6,95
Masyarakat Ekonomi	4,52	4,40	1,00	5,87	6,63	3,29	5,03

8. Kabupaten Tanjungpinang, Kepulauan Riau

Arena	Indeks Arena	Partisipasi	Transparansi	Keadilan	Akuntabilitas	Efisiensi	Efektivitas
Pejabat Politik	3,54	2,83	2,05	2,20	2,98	8,34	2,28
Birokrasi	6,14	2,43	2,12	5,46	5,45	5,83	5,98
Masyarakat Sipil	4,89	4,47	3,05	7,45	4,60	4,40	5,51
Masyarakat Ekonomi	3,78	3,62	1,00	5,28	4,96	3,60	3,63

9. Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Bangka Belitung

Arena	Indeks Arena	Partisipasi	Transparansi	Keadilan	Akuntabilitas	Efisiensi	Efektivitas
Pejabat Politik	3,37	4,34	2,22	1,57	4,63	4,14	2,86
Birokrasi	6,21	2,31	2,50	5,21	5,42	5,78	5,36
Masyarakat Sipil	4,87	4,85	3,66	7,43	2,74	5,39	5,73
Masyarakat Ekonomi	4,35	4,68	1,00	6,45	5,52	2,48	4,50

10. Kabupaten Indramayu, Jawa Barat

Arena	Indeks Arena	Partisipasi	Transparansi	Keadilan	Akuntabilitas	Efisiensi	Efektivitas
Pejabat Politik	3,18	4,47	1,98	1,81	2,21	6,98	2,27
Birokrasi	6,04	2,31	3,16	4,70	5,78	4,59	5,50
Masyarakat Sipil	4,82	4,62	3,80	7,54	2,07	5,54	6,26
Masyarakat Ekonomi	4,54	4,68	1,00	6,53	5,68	3,06	5,09

11. Kota Yoga, Provinsi D.I Yogyakarta

Arena	Indeks Arena	Partisipasi	Transparansi	Keadilan	Akuntabilitas	Efisiensi	Efektivitas
Pejabat Politik	4,83	2,77	8,58	1,96	4,53	6,73	4,62
Birokrasi	9,08	9,41	9,54	5,54	6,12	6,22	8,28
Masyarakat Sipil	7,72	5,92	9,38	7,42	9,48	7,50	7,01
Masyarakat Ekonomi	5,58	6,24	1,00	7,26	6,81	6,05	5,91

12. Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi D.I Yogyakarta

Arena	Indeks Arena	Partisipasi	Transparansi	Keadilan	Akuntabilitas	Efisiensi	Efektivitas
Pejabat Politik	4,10	2,35	6,51	2,11	3,76	5,72	3,35
Birokrasi	8,19	5,01	7,95	4,04	6,46	3,32	6,59
Masyarakat Sipil	7,11	4,54	9,33	7,70	8,98	5,54	6,57
Masyarakat Ekonomi	4,83	5,01	1,00	6,89	6,00	3,55	5,44

13. Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah

Arena	Indeks Arena	Partisipasi	Transparansi	Keadilan	Akuntabilitas	Efisiensi	Efektivitas
Pejabat Politik	5,42	4,89	6,93	2,37	6,65	6,77	5,82
Birokrasi	8,11	7,70	8,21	4,75	7,35	5,81	8,21
Masyarakat Sipil	6,30	4,98	6,94	7,14	7,05	5,76	6,13
Masyarakat Ekonomi	4,50	4,68	1,00	6,26	5,62	4,48	4,39

14. Kabupaten Sampang, Jawa Timur

Arena	Indeks Arena	Partisipasi	Transparansi	Keadilan	Akuntabilitas	Efisiensi	Efektivitas
Pejabat Politik	2,73	1,41	2,80	1,14	2,22	6,21	1,90
Birokrasi	4,95	1,76	2,49	3,22	3,74	4,49	4,99
Masyarakat Sipil	4,67	4,27	8,54	1,00	3,73	5,61	5,53
Masyarakat Ekonomi	3,91	4,17	1,00	5,39	4,96	3,26	3,88

15. Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten

Arena	Indeks Arena	Partisipasi	Transparansi	Keadilan	Akuntabilitas	Efisiensi	Efektivitas
Pejabat Politik	3,69	5,98	1,15	2,95	3,77	7,04	3,02
Birokrasi	6,27	4,19	2,80	3,92	6,74	5,68	5,68
Masyarakat Sipil	4,15	3,53	2,74	7,85	2,19	3,50	5,42
Masyarakat Ekonomi	3,83	3,78	1,00	6,32	5,03	1,95	2,99

16. Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali

Arena	Indeks Arena	Partisipasi	Transparansi	Keadilan	Akuntabilitas	Efisiensi	Efektivitas
Pejabat Politik	4,71	5,31	2,64	4,09	6,31	6,66	5,70
Birokrasi	5,59	1,55	3,66	4,49	4,17	3,41	5,26
Masyarakat Sipil	4,64	4,35	2,38	6,81	3,79	5,39	6,11
Masyarakat Ekonomi	4,58	4,01	1,00	6,10	5,95	6,51	4,22

17. Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat

Arena	Indeks Arena	Partisipasi	Transparansi	Keadilan	Akuntabilitas	Efisiensi	Efektivitas
Pejabat Politik	3,11	1,61	5,99	1,56	1,61	4,70	1,69
Birokrasi	7,02	1,00	5,75	6,76	5,04	6,11	4,74
Masyarakat Sipil	5,85	4,73	4,03	6,13	8,95	5,99	5,77
Masyarakat Ekonomi	3,96	3,78	1,00	5,85	5,20	1,95	4,56

18. Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Arena	Indeks Arena	Partisipasi	Transparansi	Keadilan	Akuntabilitas	Efisiensi	Efektivitas
Pejabat Politik	2,94	1,46	3,84	1,82	2,32	6,79	2,60
Birokrasi	6,58	2,14	4,23	6,47	4,61	4,72	5,74
Masyarakat Sipil	5,48	4,28	2,80	6,23	9,23	4,03	6,31
Masyarakat Ekonomi	4,07	2,95	1,00	5,39	4,75	7,35	4,04

19. Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat

Arena	Indeks Arena	Partisipasi	Transparansi	Keadilan	Akuntabilitas	Efisiensi	Efektivitas
Pejabat Politik	2,58	1,77	2,87	1,52	1,53	7,02	1,82
Birokrasi	6,78	2,52	6,30	5,43	4,65	5,91	5,56
Masyarakat Sipil	5,51	4,64	6,80	4,50	6,05	5,08	6,18
Masyarakat Ekonomi	4,43	3,78	1,00	5,89	4,79	8,09	4,21

20. Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah

Arena	Indeks Arena	Partisipasi	Transparansi	Keadilan	Akuntabilitas	Efisiensi	Efektivitas
Pejabat Politik	2,11	1,41	1,74	1,89	1,32	6,42	2,57
Birokrasi	5,49	1,00	3,02	4,97	3,17	4,47	4,77
Masyarakat Sipil	4,62	4,42	3,97	6,60	1,99	5,46	6,28
Masyarakat Ekonomi	4,20	3,95	1,00	6,44	5,86	2,27	4,03

21. Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan

Arena	Indeks Arena	Partisipasi	Transparansi	Keadilan	Akuntabilitas	Efisiensi	Efektivitas
Pejabat Politik	3,48	1,45	2,55	3,34	4,65	6,59	4,66
Birokrasi	6,08	1,00	5,45	4,64	4,82	4,88	4,86
Masyarakat Sipil	4,28	3,90	2,38	7,17	2,41	3,87	6,50
Masyarakat Ekonomi	4,06	3,84	1,00	6,14	5,24	2,65	4,20

22. Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur

Arena	Indeks Arena	Partisipasi	Transparansi	Keadilan	Akuntabilitas	Efisiensi	Efektivitas
Pejabat Politik	3,32	1,57	3,57	1,73	3,04	7,57	3,07
Birokrasi	6,59	1,00	3,99	5,18	4,58	5,72	5,41
Masyarakat Sipil	5,74	4,94	4,39	6,19	7,09	5,92	6,58
Masyarakat Ekonomi	4,62	4,73	1,00	6,33	6,38	3,75	4,56

23. Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara

Arena	Indeks Arena	Partisipasi	Transparansi	Keadilan	Akuntabilitas	Efisiensi	Efektivitas
Pejabat Politik	4,42	5,90	2,81	4,05	3,79	6,52	3,96
Birokrasi	6,04	3,19	2,48	6,17	4,75	6,33	6,05
Masyarakat Sipil	4,59	4,22	4,33	7,51	2,07	3,80	5,68
Masyarakat Ekonomi	3,74	3,62	1,00	5,24	4,70	3,03	4,15

24. Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara

Arena	Indeks Arena	Partisipasi	Transparansi	Keadilan	Akuntabilitas	Efisiensi	Efektivitas
Pejabat Politik	3,95	5,47	3,20	3,07	3,05	6,58	3,20
Birokrasi	7,69	4,99	5,15	6,37	8,73	5,56	5,91
Masyarakat Sipil	4,80	4,76	3,52	6,98	3,00	4,55	6,35
Masyarakat Ekonomi	3,96	3,12	1,00	5,63	4,91	5,85	3,40

25. Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah

Arena	Indeks Arena	Partisipasi	Transparansi	Keadilan	Akuntabilitas	Efisiensi	Efektivitas
Pejabat Politik	3,73	5,20	3,63	2,52	3,95	6,97	4,09
Birokrasi	5,14	1,00	2,13	4,35	3,44	4,91	4,70
Masyarakat Sipil	4,67	3,90	4,33	5,57	4,19	4,71	5,96
Masyarakat Ekonomi	3,49	3,78	1,00	5,36	4,42	1,74	3,14

26. Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan

Arena	Indeks Arena	Partisipasi	Transparansi	Keadilan	Akuntabilitas	Efisiensi	Efektivitas
Pejabat Politik	3,48	3,65	2,05	2,67	4,25	4,48	4,76
Birokrasi	5,53	1,00	1,81	5,06	5,25	4,52	4,92
Masyarakat Sipil	5,03	4,83	4,33	6,98	3,27	4,78	6,34
Masyarakat Ekonomi	4,88	4,23	1,00	7,24	5,53	6,31	4,86

27. Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara

Arena	Indeks Arena	Partisipasi	Transparansi	Keadilan	Akuntabilitas	Efisiensi	Efektivitas
Pejabat Politik	3,07	2,33	3,10	2,74	3,17	5,58	3,86
Birokrasi	5,72	1,55	2,80	4,84	3,61	5,08	6,22
Masyarakat Sipil	5,40	4,90	4,03	8,05	4,70	4,93	5,99
Masyarakat Ekonomi	3,92	3,76	1,00	5,74	4,65	3,22	4,35

28. Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat

Arena	Indeks Arena	Partisipasi	Transparansi	Keadilan	Akuntabilitas	Efisiensi	Efektivitas
Pejabat Politik	3,24	1,85	3,78	4,04	1,79	4,99	3,54
Birokrasi	6,31	4,74	4,15	6,07	5,29	3,99	5,10
Masyarakat Sipil	5,18	5,26	4,84	6,35	3,20	5,61	6,29
Masyarakat Ekonomi	4,82	4,51	1,00	6,16	5,23	7,81	5,26

29. Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo

Arena	Indeks Arena	Partisipasi	Transparansi	Keadilan	Akuntabilitas	Efisiensi	Efektivitas
Pejabat Politik	3,81	5,39	4,00	2,71	3,59	3,94	3,13
Birokrasi	5,53	1,55	4,60	5,57	4,23	4,09	5,75
Masyarakat Sipil	3,46	4,55	2,38	1,00	2,08	5,92	6,38
Masyarakat Ekonomi	5,15	4,95	1,00	6,45	6,33	8,57	4,66

30. Kota Ambon, Provinsi Maluku

Arena	Indeks Arena	Partisipasi	Transparansi	Keadilan	Akuntabilitas	Efisiensi	Efektivitas
Pejabat Politik	4,00	4,79	4,91	3,36	2,33	6,38	2,38
Birokrasi	6,22	4,54	6,14	6,19	2,51	3,43	6,11
Masyarakat Sipil	5,35	3,89	4,03	6,90	7,38	4,63	5,59
Masyarakat Ekonomi	3,67	3,78	1,00	4,88	3,80	5,82	3,25

31. Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara

Arena	Indeks Arena	Partisipasi	Transparansi	Keadilan	Akuntabilitas	Efisiensi	Efektivitas
Pejabat Politik	3,75	6,38	4,37	2,42	2,25	5,12	2,23
Birokrasi	6,29	1,00	6,40	5,41	3,88	3,73	6,11
Masyarakat Sipil	5,24	3,73	5,57	7,12	5,36	3,50	6,04
Masyarakat Ekonomi	4,03	3,51	1,00	5,29	4,26	7,94	3,46

32. Kota Jayapura, Provinsi Papua

Arena	Indeks Arena	Partisipasi	Transparansi	Keadilan	Akuntabilitas	Efisiensi	Efektivitas
Pejabat Politik	2,56	1,41	1,88	2,34	2,24	5,02	1,76
Birokrasi	5,38	1,00	2,60	4,87	3,49	4,28	6,12
Masyarakat Sipil	4,10	4,71	2,38	5,13	2,47	4,25	6,04
Masyarakat Ekonomi	3,82	2,95	1,00	5,35	4,23	6,44	3,62

33. Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat

Arena dan Fungsi	Indeks Arena	Partisipasi	Transparansi	Keadilan	Akuntabilitas	Efisiensi	Efektivitas
Pejabat Politik	2,51	5,03	1,17	2,12	2,59	2,81	2,72
Birokrasi	5,05	1,00	1,86	5,02	2,05	4,84	3,94
Masyarakat Sipil	4,98	3,52	4,34	7,19	5,97	3,19	5,49
Masyarakat Ekonomi	3,32	2,28	1,00	4,82	3,07	7,37	2,56

34. Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu

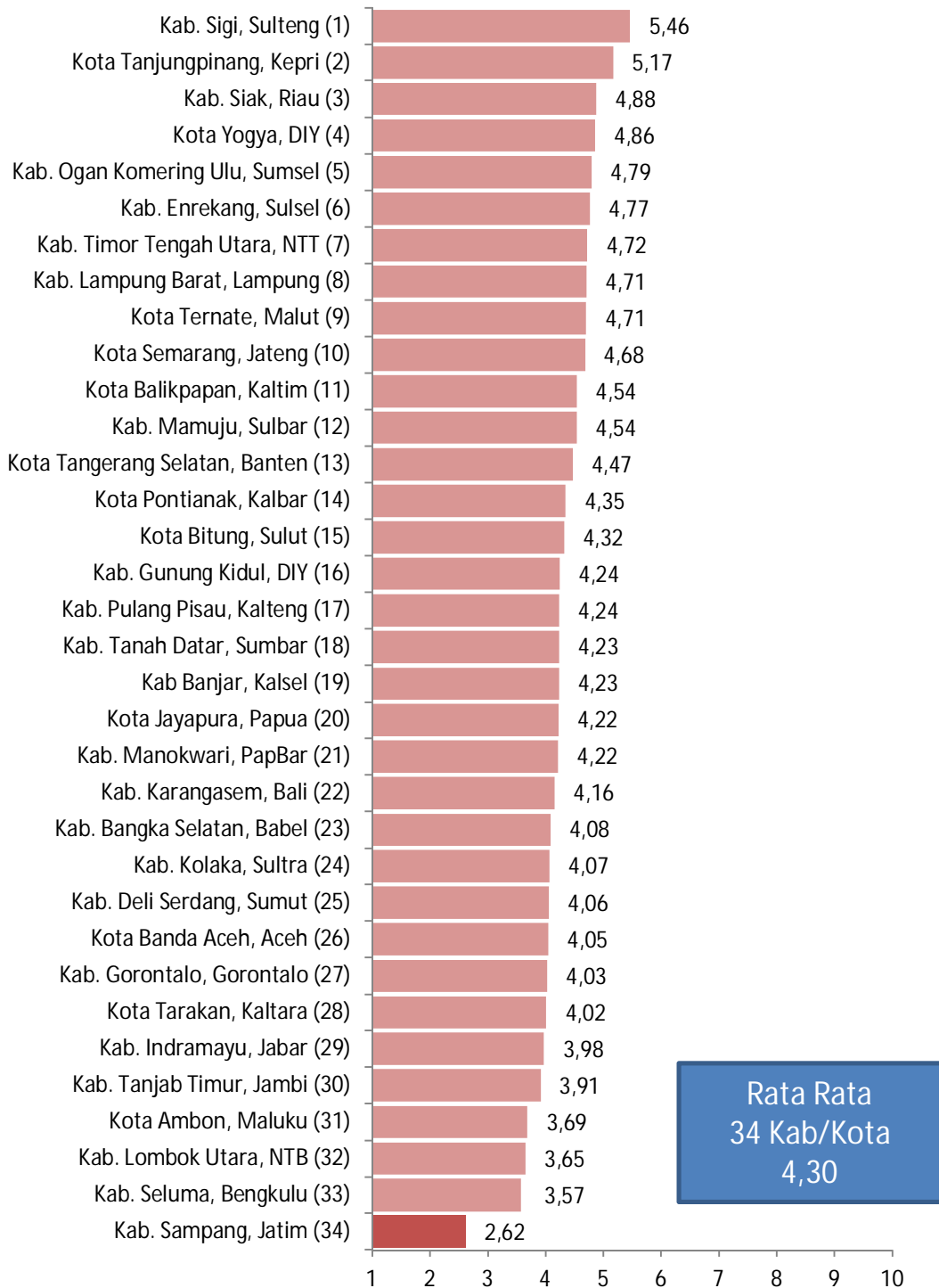
Tidak dapat diakses

LAMPIRAN III

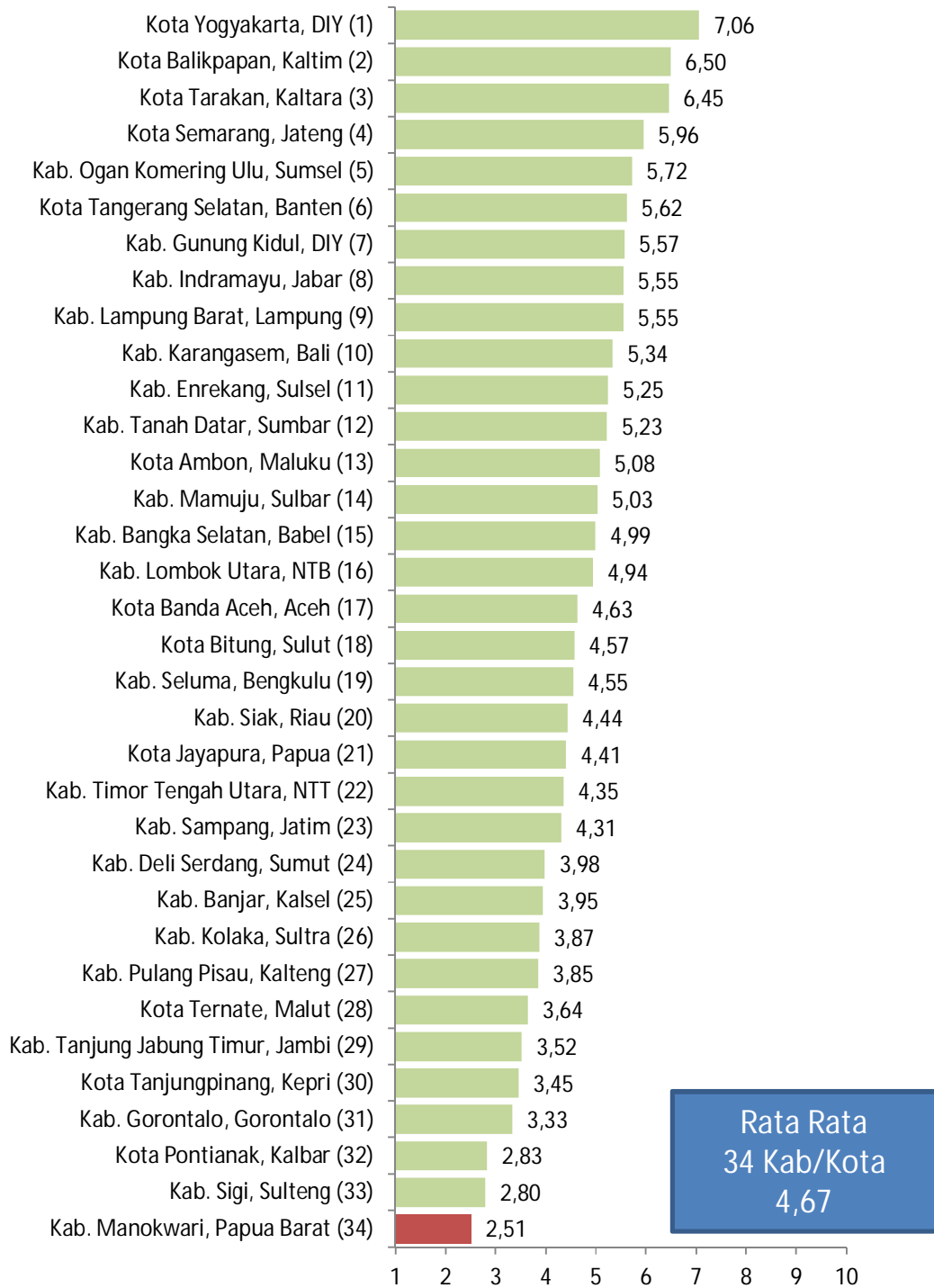
Gender, Lingkungan Hidup dan Investasi

Lampiran III. Gender, Lingkungan Hidup dan Investasi

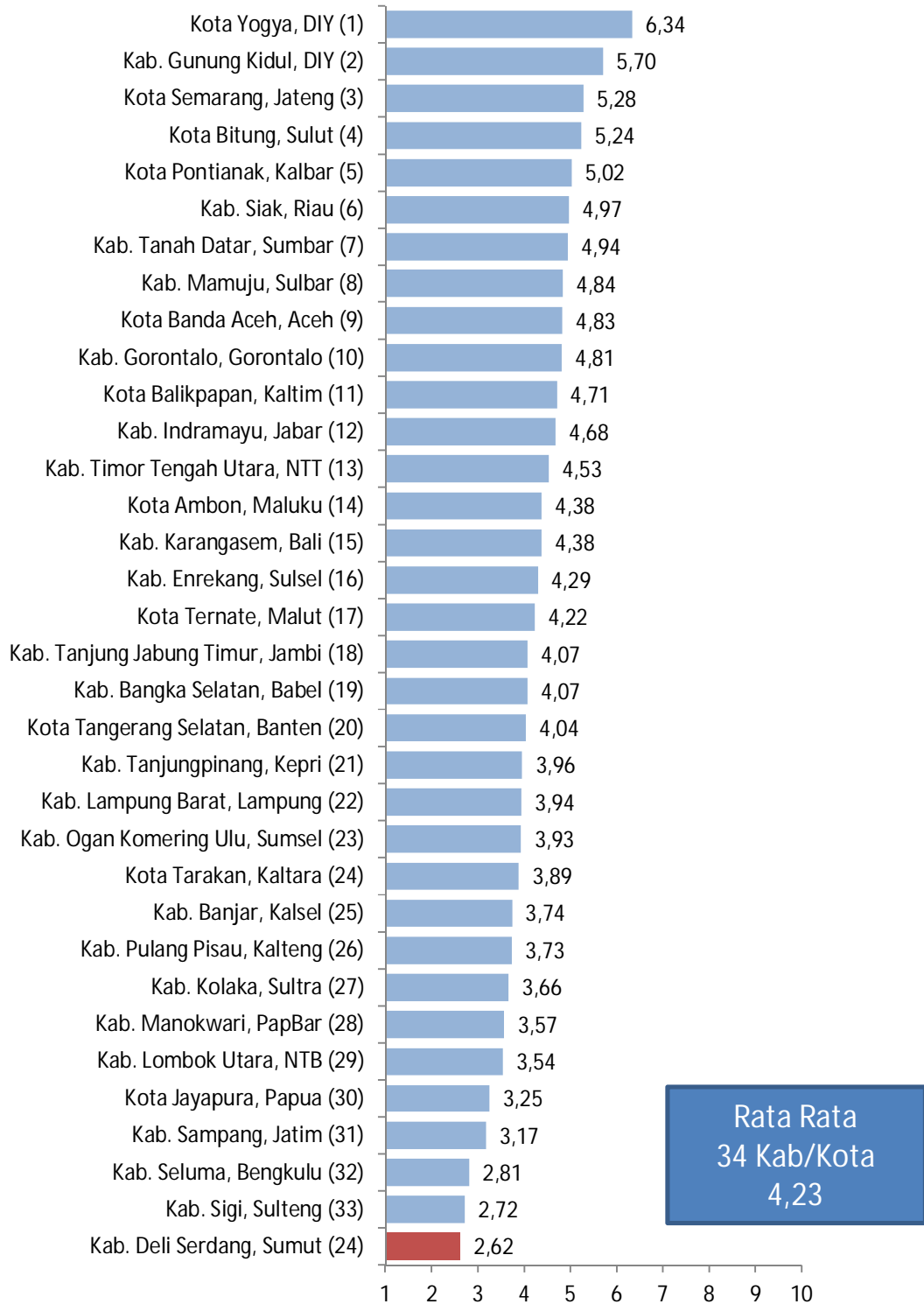
I. Capaian Indeks Indikator Terkait Gender



II. Capaian Indeks Terkait Lingkungan Hidup



III. Capaian Indeks Terkait Investasi



LAMPIRAN IV

Definisi Indonesia Governance Index (IGI)

APA ITU
INDONESIA GOVERNANCE INDEX (IGI)

IGI adalah rapor tata kelola daerah di Indonesia

IBARAT



Pelajar dinilai dari rapor

Mahasiswa dinilai dari IPK

Pegawai dinilai dari appraisal

IGI merupakan nilai kumulatif dari kinerja tata kelola daerah yang terdiri dari penilaian terhadap:



Pejabat Politik

Birokrasi

Masyarakat Sipil

Masyarakat Ekonomi

SEHINGGA

Semakin baik tata kelolanya, semakin tinggi indeksnya



6 PRINSIP IGI



KEUNIKAN IGI

IGI merupakan evaluasi berbasis data

SAAT INI	DENGAN IGI
TIDAK TERUKUR	TERUKUR
PARSIAL	KOMPREHENSIF
PERKIRAAN	BUKTI KONKRIT
TAK TERBANDING	TERBANDINGKAN



<http://kemitraan.or.id/igi/>



LAMPIRAN V

Daftar Indikator IGI Kabupaten/Kota

Lampiran V. Daftar Indikator IGI Kabupaten/Kota

A. Daftar Indikator Indonesia Governance Index

No	Kode	Indikator	Tipe Data		
			Obyektif	Uji Akses	Persepsi
Arena Pejabat Politik					
Prinsip Partisipasi					
1	P1P1	Variasi stakeholder yang terlibat dalam rapat paripurna proses penyusunan Perda.	√		
2	P1P2	Variasi stakeholder yang terlibat dalam rapat konsultasi publik/konsultasi stakeholder pada proses penyusunan Perda.	√		
3	P2P1	Variasi stakeholder yang terlibat dalam rapat konsultasi publik/konsultasi stakeholder proses penyusunan perda APBD di eksekutif	√		
4	P3P1	Pelebagaan Pengaduan Masyarakat di DPRD melalui sms, hotline, website	√		
5	P3P2	Persentase anggota DPRD yang memiliki kanal partisipasi (social media, website (blog), rumah aspirasi)	√		
6	P4P1	Persentase kehadiran Bupati/walikota di rapat Paripurna	√		
Prinsip Transparansi					
7	P1T1	Kemudahan akses terhadap dokumen Program Legislasi Daerah (Prolegda) di DPRD		√	
8	P1T2	Kemudahan akses terhadap dokumen PERDA dan Peraturan Bupati/Walikota non APBD		√	
9	P2T1	Kemudahan akses Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Nota Keuangan, dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)		√	
10	P2T2	Kemudahan akses dokumen Perda/Perbup APBD Penetapan, Perubahan, Realisasi Kabupaten/Kota		√	
11	P2T3	Kemudahan akses terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)		√	
12	P3T1	Kemudahan Akses Penggunaan Dana Aspirasi (Reses) Anggota DPRD Kabupaten/kota		√	
13	P3T2	Kemudahan akses laporan kegiatan kunjungan kerja DPRD, rapat evaluasi/hearing DPRD dengan SKPD dalam rangka pengawasan DPRD.		√	
14	P4T1	Kemudahan akses terhadap hasil-hasil rapat koordinasi Bupati/Walikota dengan para camat dan kepala desa/lurah		√	

No	Kode	Indikator	Tipe Data		
			Obyektif	Uji Akses	Persepsi
Prinsip Keadilan					
15	P1F1	Persentase anggota DPRD perempuan di DPRD Kab/Kota	√		
16	P1F2	Jumlah Perda dan produk hukum daerah terkait perlindungan kelompok terpinggirkan (perempuan, anak, ODHA, penyandang cacat)	√		
17	P2F1	Anggaran APBD untuk kesehatan perkapita (diluar belanja pegawai), disesuaikan dengan indeks kemahalan konstruksi Kabupaten/Kota	√		
18	P2F2	Anggaran APBD untuk bidang pendidikan per siswa (diluar belanja pegawai), disesuaikan dengan indeks kemahalan konstruksi Kabupaten/Kota	√		
19	P2F3	Anggaran APBD untuk penanganan kemiskinan perkapita (diluar belanja pegawai), disesuaikan dengan indeks kemahalan konstruksi Kabupaten/Kota	√		
20	P2F4	Anggaran APBD pemberdayaan perempuan per perempuan (diluar belanja pegawai), disesuaikan dengan indeks kemahalan konstruksi Kabupaten/Kota.	√		
21	P2F5	Anggaran APBD program lingkungan hidup dan sanitasi per kapita (diluar belanja pegawai), disesuaikan dengan indeks kemahalan konstruksi Kabupaten/Kota	√		
22	P3F1	Distribusi rapat kerja komisi DPRD dengan SKPD (Dibuat Form Raker DPRD-Kabid-, Dokumen dibawa, Peneliti IGI memverifikasi)	√		
23	P3F2	Persentase anggota DPRD perempuan dalam Tim Pengawasan (BK, Panwas)	√		
24	P4F1	Kesempatan promosi dan rekrutmen pejabat pemerintah daerah (atribut)	√		
Prinsip Akuntabilitas					
25	P2A1	Rata-rata tingkat kehadiran anggota DPRD dalam pembahasan Perda	√		
26	P2A2	Persentase jumlah Perda yang disahkan terhadap jumlah rencana Perda dalam Prolegda tahun 2012	√		
27	P1A1	Kesesuaian APBD dengan KUA/PPAS	√		
28	P1A2	Rasio Belanja Hibah/Subsidi dan Bantuan Sosial terhadap Belanja Barang/Jasa dan Modal	√		
29	P1A3	Rasio APBD Perubahan terhadap APBD Penetapan tanpa adanya perubahan asumsi dasar dll.	√		
30	P3A1	Kualitas laporan kegiatan kunjungan kerja komisi DPRD dalam rangka pengawasan (non-Studi banding)	√		
31	P3A2	Persentase anggota DPRD yang memberikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Penyelenggara Negara (LHKPN)	√		
32	P4A1	Kesesuaian Target Capaian Pemenuhan hak-hak dasar di RPJMD dengan Capaian Tahunan Pemerintah dalam LKPJ	√		

No	Kode	Indikator	Tipe Data		
			Obyektif	Uji Akses	Persepsi
Prinsip Efisiensi					
33	P211	Rasio anggaran aparatur (biaya langsung dan tidak langsung) terhadap belanja publik (barang jasa dan modal)	√		
34	P212	Persentase realisasi belanja perjalanan dinas DPRD terhadap Total realisasi belanja DPRD	√		
35	P111	Rata-rata waktu penyelesaian Perda di DPRD dalam setahun terakhir	√		
36	P112	Persentase Total Budget DPRD terhadap Total APBD Realisasi Kabupaten/Kota	√		
37	P113	Rata-rata lama waktu penerbitan Peraturan Bupati/Walikota tentang implementasi Perda yang telah disahkan	√		
38	P311	Persentase anggaran "Penyerapan Aspirasi Masyarakat" terhadap Total Belanja Tidak Langsung + Belanja Kunjungan Kerja dan Bimtek + Biaya operasional pimpinan DPRD + Belanja Penyerapan Aspirasi Masyarakat	√		
39	P411	Persentase Anggaran Operasional Bupati/Walikota terhadap PAD	√		
Prinsip Efektivitas					
40	P2E1	Jumlah Perda inisiatif per tahun	√		
41	P2E2	Jumlah Peraturan bupati/walikota tentang implementasi Perda dibandingkan dengan jumlah Perda yang disahkan pada tahun 2012	√		
42	P1E1	Ketepatan waktu pengesahan Perda APBD	√		
43	P1E2	Rasio PAD terhadap PDRB Kabupaten/Kota	√		
44	P1E3	Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten/Kota	√		
45	P1E4	Tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota	√		
46	P3E1	Rasio jumlah laporan kegiatan pengawasan DPRD (rapat evaluasi/hearing dengan SKPD) yang memuat rekomendasi terhadap total laporan kegiatan pengawasan DPRD (rapat evaluasi/hearing dengan SKPD) selama satu tahun.	√		
47	P4E1	Nilai EKPPD	√		
48	P4E2	Indikator Lingkungan: Rasio lahan kritis terhadap luas wilayah (SLHD)	√		

Arena Birokrasi					
Prinsip Partisipasi			Tipe Data		
			Obyektif	Uji Akses	Persepsi
49	B1P1	Unit Pelayanan Pengaduan Masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan dan pengentasan kemiskinan.	√		
50	B1P2	Keberadaan dewan kesehatan, dewan pendidikan	√		
51	B2P1	Unit Pelayanan Pengaduan Masyarakat di Dispenda Kabupaten/Kota	√		
52	B3P1	Keberadaan forum reguler antara pemerintah kabupaten kota dan masyarakat untuk memperkuat iklim investasi, penciptaan lapangan kerja, dan pemberdayaan ekonomi rakyat	√		
53	B4P1	Pelembagaan Pelayanan Pengaduan Masyarakat di Kantor Satpol PP/Dinas Tramtib	√		
Prinsip Transparansi					
54	B1T1	Kemudahan akses terhadap informasi tentang Pengelolaan SDM di bidang pendidikan		√	
55	B1T2	Kemudahan akses terhadap informasi biaya dan prosedur pengurusan pelayanan publik (Catatan Sipil, Pendidikan dan Kesehatan)		√	
56	B1T3	Kemudahan akses terhadap dokumen Keuangan SKPD (RKA SKPD, RKA PPKD, Ringkasan DPA SKPD & PPKD)		√	
57	B2T1	Kemudahan akses terhadap Potensi Penerimaan Daerah		√	
58	B2T2	Kemudahan akses masyarakat terhadap rincian realisasi penerimaan keuangan Kabupaten/Kota di DPKAD		√	
59	B3T1	Kemudahan akses terhadap informasi biaya dan prosedur pengurusan perizinan usaha		√	
60	B3T2	Kemudahan akses terhadap regulasi tentang investasi di Kabupaten/ Kota		√	
61	B4T1	Akses terhadap laporan operasi penertiban atas pelanggaran Perda		√	
Prinsip Keadilan					
62	B1F1	Rasio tenaga medis per 10.000 penduduk	√		
63	B1F2	Rasio lamanya sekolah anak laki-laki dan perempuan (mean years of schooling)	√		
64	B1F3	Persentase perempuan pejabat struktural se kab/kota	√		
65	B1F4	Rasio puskesmas terhadap jumlah penduduk	√		
66	B1F5	Ketimpangan rasio guru dan murid dikabupaten/kota	√		
67	B2F1	Distribusi sektor perekonomian yang menjadi sumber pajak dan retribusi daerah	√		
68	B3F1	Komitmen Anggaran untuk (Belanja BJM pada urusan Naker, 1.14) per Angkatan Kerja	√		
69	B3F2	Jumlah tenaga kerja perempuan yang dibina Disnaker per total angkatan kerja	√		
70	B3F3	Rasio Nilai BJM, melalui LPSE dibanding dengan Belanja Langsung BJM (>70 =;)	√		
71	B4F1	Distribusi frekuensi razia atas berbagai pelanggaran Perda	√		

		(razia PKL, Hotel, dll)			
No	Kode	Indikator	Tipe Data		
			Obyektif	Uji Akses	Persepsi
Prinsip Akuntabilitas					
72	B1A1	Capaian jumlah indikator SPM (kesehatan, pendidikan, perlindungan perempuan dan anak, lingkungan hidup, bidang pemerintahan dalam negeri) per kabupaten/kota	√		
73	B1A2	Opini audit BPK terhadap APBD	√		
74	B2A1	Kesesuaian potensi pendapatan daerah dengan realisasinya	√		
75	B3A1	Pelayanan Untuk Pengurusan Investasi	√		
76	B3A2	Kesesuaian Standar Pelayanan Minimal untuk pengurusan ijin-ijin usaha dengan SPM Badan Koordinasi Pelayanan Modal (BKPM)	√		
77	B4A1	Rasio SatPol PP per 1.000 penduduk	√		
Prinsip Efisiensi					
78	B1I1	Rasio anggaran untuk Belanja Aparatur (Langsung dan Tidak Langsung) terhadap Total Belanja Publik Kabupaten	√		
79	B1I2	Rasio jumlah PNS struktural terhadap jumlah penduduk	√		
80	B2I1	Persentase overhead cost DPKAD terhadap PAD	√		
81	B3I1	Lama waktu resmi pengurusan ijin usaha UMKM	√		
82	B4I1	Belanja Langsung Satpol PP per kapita	√		
83	B4I2	Rasio penertiban Perda terhadap total Satpol PP	√		
Prinsip Efektivitas					
84	B1E1	Indeks Pembangunan Manusia	√		
85	B1E2	Persentase kelahiran yang dibantu medis	√		
86	B1E3	Mekanisme evaluasi terhadap Pelayanan melalui Polling Kepuasan Pelanggan (Atribut) (Pendidikan, Kesehatan, Disdukcapil)	√		
87	B2E1	Persentase anggaran tahunan Dispenda terhadap realisasi PAD (Pendapatan Asli Daerah)	√		
88	B3E1	Pertumbuhan Ekonomi	√		
89	B3E2	Besaran Pekerja atau Buruh sebagai peserta jamsostek	√		
90	B3E3	Indeks Pemberdayaan Gender	√		
91	B4E1	Rasio penertiban Perda terhadap total penduduk	√		

Arena Masyarakat Sipil					
No	Kode	Indikator	Tipe Data		
			Obyektif	Uji Akses	Persepsi
Prinsip Partisipasi					
92	C1P1	Tingkat partisipasi masyarakat dalam keanggotaan organisasi kemasyarakatan (persepsi)			√
93	C1P2	Akomodasi kebutuhan pemberdayaan kelompok marginal (persepsi)			√
94	C2P1	Tingkat terpaan media (cetak dan radio)/10.000 penduduk (Obj)	√		
95	C2P2	RasioJumlah total OMS /10.000 penduduk (obj)	√		
96	C2P3	Tingkat keaktifan pelaku MS yang menyuarakan kepentingan publik di media (persepsi dengan matriks atribut)			√
Prinsip Transparansi					
97	C1T1	Akses terhadap informasi lokasi/daerah/komunitas binaan program pemberdayaan masyarakat		√	
98	C1T2	Frekuensi update website		√	
99	C2T1	Aksesterhadap program OMS		√	
100	C2T3	Aksesinformasikeuangan		√	
101	C2T3	Akses informasi kelembagaan		√	
Prinsip Keadilan					
102	C1F1	Keadilan sebaran variasi isu publik OMS (persepsi matriks dengan kategori organisasi dan isu)			√
103	C2F1	Distribusi isu-isu yang diperjuangkan masyarakat sipil daerah (Obj)	√		

No	Kode	Indikator	Tipe Data		
			Obyektif	Uji Akses	Persepsi
Prinsip Akuntabilitas					
104	C1A1	Kualitas Laporan program dan keuangan kelembagaan (dokumen)	√		
105	C1A2	Kualitas Prosedur monitoring dan evaluasi (dokumen)	√		
106	C1A3	Kualitas laporan evaluasi program dan keuangan? (audit)? (dokumen)	√		
107	C2A1	Frekuensi kasus-kasus penyimpangan oleh masyarakat sipil (persepsi)			√
108	C2A2	Dokumen Kepatuhan ketentuan pajak (SPT/NPWP) Organisasi (dokumen)	√		
Prinsip Efisiensi					
109	C1I1	Relasi antar organisasi kemasyarakatan dalam pemberdayaan (Persepsi matriks dari aktif informal, jaringan hingga pembentukan aliansi/forum/koalisi ormas)			√
110	C2I1	Relasi antar organisasi kemasyarakatan dalam Advokasi (Persepsi matriks dari aktif informal, jaringan hingga pembentukan aliansi/forum/koalisi ormas)			√
Prinsip Efektivitas					
111	C1E1	Kapasitas OMS (semua tipe ormas)			√
112	C1E2	Keberlanjutan organisasi masyarakat sipil			√
113	C1E3	Hasil indeks gender (IPG dan IPD) meneg PP tingkat kabupaten (Obj)	√		
114	C2E1	Kontribusi MS dalam berbagai sektor			√
115	C2E2	Frekuensi demonstrasi yang cenderung ke arah negatif (persepsi)			√
116	C2E3	Tingkat partisipasi politik di pilkada terakhir (KPUD) (Obj)	√		

No	Kode	Indikator	Tipe Data		
			Obyektif	Uji Akses	Persepsi
Arena Masyarakat Ekonomi					
Prinsip Partisipasi					
117	E1P1	Persentase kehadiran wakil pengusaha dalam rapat-rapat di Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota terhadap Total Pengusaha	√		
118	E2P1	Keaktifan UMKM dalam Forum Reguler Pemerintah dan Dunia Usaha (Persepsi)			√
Prinsip Transparansi					
119	E1T1	Kemudahan akses terhadap informasi kegiatan dan keuangan asosiasi-asosiasi bisnis besar (HIPMI, Gapensi dan Kadin) di kabupaten/kota		√	
120	E2T1	Ketersediaan akses informasi terhadap program pemberdayaan UMKM di Asosiasi Bisnis Besar(HIPMI, Gapensi dan Kadin).		√	
Prinsip Keadilan					
121	E1F1	Rasio jumlah KHL yang diusulkan pengusaha terhadap KHL penetapan	√		
122	E1F2	Persaingan Tender barang dan jasa secara Fair oleh Perusahaan di Kabupaten/Kota (persepsi)			√
123	E2F1	Distribusi sektoral UMKM yang menerima kredit Perbankan Pemerintah	√		
124	E2F2	Keberpihakan terhadap Pengusaha Perempuan di Kabupaten/Kota (persepsi)			√

No	Kode	Indikator	Tipe Data		
			Obyektif	Uji Akses	Persepsi
Prinsip Akuntabilitas					
125	E1T1	Kepatuhan sektor usaha dalam membayar Pajak / retribusi (persepsi)			√
126	E2A1	Kepatuhan UMKM terhadap Kelestarian dan Keberlanjutan Lingkungan (Persepsi)			√
Prinsip Efisiensi					
127	E1I1	Penggunaan energi dan sumberdaya alam yang ramah Lingkungan oleh Perusahaan di Kab/Kota (Persepsi)			√
128	E2I1	Rasio BelanjaLangsung (Barang/Jasa/Modal) urusan Koperasi UKM terhadap Total UMKM (Lampiran 4 Perda Kode urusan 15.)	√		
Prinsip Efektivitas					
129	E1E1	Tingkat penyerapan lapangan kerja atau jumlah lapangan kerja yang tercipta	√		
130	E1E2	Tingkat pertumbuhan usaha/perusahaan baru	√		
131	E2E1	Efektifitas penyaluran Kredit kepada UMKM (persepsi)			√

Indonesia Governance Index

IGI merupakan alat untuk mengukur kinerja pemerintahan daerah, khususnya terhadap empat arena pemerintahan yaitu arena pemerintah (legislatif dan eksekutif), birokrasi, masyarakat sipil, dan masyarakat ekonomi berdasarkan beberapa kriteria data yang obyektif dan terukur. Hasil dari IGI menyajikan (1) Profil kinerja tata kelola pemerintahan di masing-masing provinsi, (2) Peringkat secara keseluruhan dari semua provinsi, (3) Peringkat provinsi berdasarkan arena tata kelola, (4) Data-data komprehensif terkait dengan isu-isu tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Partnership (Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan)

Partnership adalah sebuah organisasi multi pihak yang didirikan oleh tokoh tokoh terkemuka Indonesia dari unsur pemerintah dan organisasi masyarakat sipil (CSO) untuk mempromosikan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance). Partnership didirikan tahun 2000 sebagai sebuah proyek Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB-United Nations Development Programme/UNDP) dan menjadi badan hukum Indonesia yang independen sejak tahun 2003. Partnership bekerja untuk menciptakan lingkungan yang mendukung reformasi di mana berbagai komponen masyarakat bersama sama membahas, mengadvokasi dan mendukung pelaksanaan unsur unsur penting agenda reformasi Indonesia .

